TABLOID SinarTani

TERBIT SETIAP HARI RABU
Harga Tabloid Cetak : Rp 16.000
E-paper : Rp 72.000/Tahun (48 edisi)
www.tabloidsinartani.com

Hotline/SMS : 081317575066
e-mail : redaksi@sinartani.co.id
www.sinartani.co.id

Edisi 16 - 22 April 2025
No. 4082
Tahun LV



8 Jelang Musim Tanam, Ketersediaan Pupuk Kembali jadi Sorotan

9 Jambore Perhiptani Jawa Barat 2025: Menyatukan Semangat, Menguatkan Kolaborasi

14 Melirik Padi Gogo, Alternatif Pengungkit Produksi Pangan



www.sinartani.co.id tabloidsinartani.com @SinarTaniST tabloidsinartani SINTA TV



EDITORIAL

Geger **Tarif Trump**

Usai dilantik menjadi Presiden AS ke-47 pada 20 Januari 2025 lalu menggantikan Joe Biden, Donald Trump bikin kegeger dunia dari berbagai pernyataannya. Misalnya, pada 4 Februari, Trump menyatakan AS akan mengambil alih Jalur Gaza dan menjadikan wilayah Palestina "Riviera di Timur Tengah". Trump bahkan memiliki ide yang sangat kontroversial yakni merelokasi penduduk Palestina di Gaza ke negara-negara tetangga.

Setelah itu Trump ia juga sempat mengungkapkan akan menjadikan Negara Kanada sebagai negara bagian AS. Terakhir, pada 4 April 2025, dunia dibuat tersentak dengan kebijakan tarif impor. Indonesia sendiri terkena tarif impor 32 persen. Heboh soal tarif impor dari Trump kini menjadi ramai diperbincangan berbagai kalangan dunia usaha dan para ekonomi.

Begitu juga dampaknya terhadap sektor pertanian. Bagi Indonesia kebijakan tersebut akan berimbas cukup besar, termasuk produk pertanian. Karena itu, Tabloid Sinar Tani juga mencoba menyoroti kebijakan tarif Trump tersebut dalam Sorotan terbitan kali ini.

Jika melihat data-data perdagangan Indonesia ke AS, maka produk Perkebunan dan perikanan yang bakal paling besar terkena imbasnya. Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2024 mencatat, nilai ekspor produk pangan-pertanian Indonesia ke AS meliputi minyak sawit dan turunannya 1,3 miliar dollar AS (4,9%), ban dari karet 800 juta dollar AS (3%), alas kaki bersol karet 792 juta dollar AS (3%) dan karet alam 673 juta dollar AS (2,6%).

Sedangkan produk perikanan seperti krustasea udang-kepiting 751 juta dollar AS (2,8%), krustasea lain—kerang-tiram dengan dan tanpa cangkang 685 juta dollar AS (2,6%). Dengan tarif impor 32 persen tersebut, sudah pasti kebijakan Trump tersebut akan mempengaruhi perdagangan produk pertanian ke Negeri Paman Sam.

Menanggapi persoalan tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengajukan permintaan resmi untuk menggelar pertemuan bilateral antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Bahkan menurut Menteri Luar Negeri RI Sugiono sejumlah delegasi, termasuk dari Kementerian Luar Negeri, telah dikirim ke Washington D.C. untuk membahas hubungan bilateral Indonesia–AS, serta dinamika kebijakan perdagangan terbaru dari Pemerintah AS.

Dalam hal ini memang pemerintah harus segera turun tangan, bukan hanya negosiasi kembali ke Pemerintah AS, tapi juga mencari jalan keluar lain. Misalnya, diversifikasi pasar ke negara lain. Dengan demikian, di balik kebijakan tarif Trump masih ada peluang bagi pelaku usaha Indonesia untuk mengembangkan ke pasar lainnya.

Pupuk, MBG dan Jambore Penyuluh

Selain isu tarif Trump yang tengah hangat dbicarakan, persoalan dalam negeri lainnya, terutama di sektor pertanian yang perlu dicermati adalah masalah ketersediaan pupuk menjelang musim tanam kedua. Seperti diketahui pemerintah telah menerbitkan regulasi baru mengenai tata kelola pupuk subsidi. Efektifitas kebijakan tersebut akan diuji pada musim tanam gadu tahun ini.

Informasi lain yang Sinar Tani sajikan minggu ini hasil wawancara dengan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengenai program Makan Bergizi Gratis dan sejauh mana dampak program tersebut terhadap masyarakat. Selain itu ada rubrik Geliat Penyuluh mengenai rencana Jambore Penyuluh Pertanian Jawa Barat yang akan berlangsung pada 6-8 Mei mendatang.

SAUNG TANI

Presiden AS Donald Trump bikin geger dunia dengan kebijakan tarif impor
- Ada yang berani melawan?

Presiden Prabowo hapus kuota impor
- Hapus monopoli impor juga ya pak?

Kepala BGN bilang Program MBG bukan sekedar kasih makan
- Tapi ada dampak lain ya pak?

MENTAN MENYAPA



Andi Amran Sulaiman
Menteri Pertanian RI

Kita Patut Bersyukur, **Pangan Kita Cukup**

Alhamdullah.., saat ini Indonesia berada dalam kondisi terbaik dalam hal ketahanan pangan selama dua dekade terakhir. Dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto terhadap sektor pertanian terbukti membawa hasil nyata. Sarana produksi, hilirisasi, hingga pengendalian harga terus didorong pemerintah demi memastikan kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Sekarang ini petani bahagia, produksi meningkat, ketahanan pangan kita kuat, stok kita tertinggi selama 20 tahun. Menurut BPS, produksi padi kita saat ini tertinggi selama 7 tahun. Saat ini Indonesia mencatatkan peningkatan produksi pertanian dengan lonjakan sebesar 62 persen.

Setelah 160 hari mendampingi Bapak Presiden, kita mencatat capaian pertanian tertinggi selama Indonesia merdeka. Produksi naik hingga 62 persen. Ini bukan kata saya, ini kata Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara sejumlah negara seperti Malaysia, Jepang, dan Filipina tengah menghadapi krisis beras, Indonesia justru mampu menjaga stabilitas pangan nasional.

Karena itu, kita patut bersyukur. Bayangkan, dengan jumlah penduduk 282 juta jiwa, jika terjadi kelangkaan pangan dampaknya sangat besar. Bisa timbul konflik sosial, bahkan mengancam stabilitas negara. Untuk itu, kita menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian luar biasa di sektor pertanian selama periode kepimpinan Presiden Prabowo.

Saat ini pemerintah tengah berupaya keras meningkatkan produksi melalui program jangka panjang seperti cetak sawah 3 juta ha. Selain itu, melakukan optimasi lahan secara masif dan mendorong para petani untuk bertransformasi dari pertanian tradisional menuju pertanian modern.

Semua program kerja tersebut dilaksanakan secara baik dan konsisten, sehingga hasilnya mulai dirasakan masyarakat. Setidaknya ada lebih dari 40 ribu ha lahan cetak sawah yang berhasil dipanen di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

Jadi ini bukan omon-omon, dan bahkan untuk program yang di Merauke, Bapak Presiden langsung turun ke lapangan dengan melakukan panen di Wanam. Itu adalah kunjungan pertama Bapak Presiden setelah dilantik. Kemudian di Kalimantan Tengah kami juga bergerak melakukan pembangunan di sana.

Kementerian Pertanian tetap melakukan pendampingan terhadap para petani di seluruh Indonesia untuk mencapai visi besar Presiden Prabowo Subianto, yaitu capaian swasembada dalam waktu cepat. Saya ingin berbuat yang terbaik untuk merah putih. Insyaalah mudah mudahan 3 Minggu ke depan kalau sudah 3 juta ton Indonesia sudah bisa swasembada.

Seperti diketahui, BPS mencatat produksi padi nasional pada Februari 2025 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data BPS, luas panen padi pada Februari 2025 mencapai 0,76 juta ha atau naik 0,29 juta ha (63,53 persen) dibandingkan Februari 2024 yang hanya sebesar 0,46 juta ha.

Produksi padi dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG) pada Februari 2025 diperkirakan sebesar 3,88 juta ton GKG. Angka ini naik 1,47 juta ton GKG (60,86 persen) dibandingkan Februari 2024 yang sebesar 2,41 juta ton GKG. BPS juga memperkirakan potensi luas panen pada Maret–Mei 2025 mencapai 4,30 juta hektare. Angka tersebut meningkat 0,23 juta ha dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

PINDAI BARCODE!
Untuk Mengakses e-paper Sinartani.



Desain Cover: Budi Putra K.
Foto Cover: Freepik

Pemimpin Umum/Penanggung Jawab : Dr. Ir. Memed Gunawan; **Pemimpin Perusahaan :** Ir. Mulyono Machmur, MS; **Pemimpin Redaksi :** Yulianto; **Redaktur Pelaksana :** Yulianto; **Redaktur :** Gesha Yuliani, S.Pi; **Staff Redaksi :** Julian Ahmad; Nattasya; Indri Hapsari, S. Sos; Echa; Herman Rafi; **Koresponden :** Wasis (Cilacap), Soleman (Jatim), Suriady (Sulsel), Abdul Azis (Aceh), Suroyo (Banten), Gultom (Sumut), Nsd (Papua Barat);
Layoutman : Suhendra, Budi Putra Kharisma; **Korektor/Setter**: Asrori, Hamdani; **Sekretariat Redaksi:** Hamdani; **Pengembangan Bisnis :** Dewi Ratnawati; Indri; Echa Sinaga; **Keuangan:** Katijo, SE (Manajer); Ahmad Asrori; **Sekretariat Perusahaan** : Suparjan; Jamhari; Awan; **Distribusi:** Saptyan Edi Kurniawan, S.AP; Dani; Jamhari
Penerbit: PT. Duta Karya Swasta; Komisaris Utama: DR. Ir. A. H. Rahadian, M.Si; **Komisaris:** Ir. Achmad Saubari Prasodjo
Direktur Utama: DR. Ir. Memed Gunawan; **Direktur:** Ir. Mulyono Machmur, MS
Alamat Redaksi dan Pemasaran/Iklan: Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta 12550, Telp. (021) 7812162-63, 7817544 Fax: (021) 7818205
Email: redaksi@sinartani.co.id; **Izin Terbit** No. 208/SK/Menpen/SIUPP/B.2/1986; Anggota SPS No. 58/1970/11B/2002; **Izin Cetak:** Laksus Pangkopkamtibda Jaya No. Kep. 023/PK/IC/7; **Harga:** Rp. 16.000 per edisi; **Tarif Iklan: FC** Rp. 8000/mmk, **BW** Rp. 7.000/mmk; **Pembayaran:** Bank Mandiri Cab. Ragunan No. 127.0096.016.413, BNI'46 Cab. Dukuh Bawah Jakarta No. 14471522, Bank Agro Kantor Pusat No. 01.00457.503.1.9 a/n Surat Kabar Sinar Tani. Bank BRI Cabang Pasar Minggu: a/n PT. Duta Karya Swasta No. 0339.01.000419.30.1; **ISSN:** 0852-8586; **Percetakan:** PT. Aliansi Temprina Nyata Grafika

Hijauan Pakan Ternak, Ladang Hijau Mengalirkan Cuan

Dalam dunia pertanian, hijauan pakan ternak kini jadi ladang bisnis menguntungkan. Dengan biaya rendah dan permintaan terus meningkat, peluang meraup cuan dari rumput segar semakin terbuka lebar.



Bisnis peternakan selama ini identik dengan hasil utama seperti daging, susu, atau telur. Namun, siapa sangka, ada potensi emas yang jarang dilirik hijauan pakan ternak. Di tengah kebutuhan pakan ternak ruminansia yang terus meningkat, komoditas ini justru sering terabaikan. Padahal, di balik dedaunan dan rerumputan hijau itu, mengalir peluang usaha yang menggiurkan.

Masih banyak peternak, bahkan skala besar, yang memilih untuk mencari rumput sendiri (ngarit) di sekitar kandang. Bukan karena ingin berhemat, tapi karena pasokan hijauan dari luar tak selalu bisa diandalkan. Inilah celah besar yang membuka pintu bisnis hijauan pakan ternak.

Contoh Pakan Hijauan

Hijauan seperti rumput gajah, legum, jerami padi, pelepah kelapa sawit, hingga daun pisang ternyata punya nilai gizi tinggi untuk ternak. Tak hanya kaya serat, jenis tertentu seperti legum juga tinggi protein. Jika peternak bisa menyajikan pakan berkualitas secara konsisten, maka efisiensi produksi bisa meningkat tajam. Salah satunya karena mampu menekan biaya penggunaan konsentrat, yang harganya makin hari makin melambung.

Salah satu jenis hijauan unggulan adalah rumput gajah, baik yang jenis Pak Chong (untuk sapi) maupun Odot (untuk kambing dan domba). Tinggi rumput bisa mencapai 3 meter dan sudah bisa dipanen pada usia 100 hari. Uniknya, untuk panen kedua dan seterusnya, petani tak perlu menanam ulang. Akar yang tertinggal akan tumbuh tunas baru. Dengan sistem ini, panen bisa dilakukan setiap 40–50 hari sekali.

Harga jualnya juga cukup menjanjikan. Di petani, rumput dihargai sekitar Rp200 per kg. Tapi setelah ditambah ongkos kirim, bisa mencapai Rp600–Rp700 per kg di tangan peternak. Jika satu hektare lahan bisa menghasilkan puluhan ton hijauan sekali panen, maka dalam satu siklus saja petani bisa meraup untung bersih hingga Rp10 juta. Bayangkan jika dikelola di atas lahan 10 hektare lebih—cuannya makin deras!

Tak hanya menjual hasil panen, para petani hijauan juga menjajakan bibit rumput. Satu batang bibit berukuran sekitar 15 cm dihargai Rp150. Dengan jarak tanam antar bibit 50 cm, dalam waktu singkat lahan bisa disulap menjadi hamparan ladang hijau siap panen.

Dunia peternakan tidak pernah tidur. Ternak harus makan tiap hari. Dan di momen tertentu seperti menjelang Idul Adha, kebutuhan hijauan melonjak drastis karena lonjakan populasi sapi potong. Belum lagi kebutuhan dari kebun binatang dan peternakan besar lainnya. Ini jadi bukti nyata bahwa pasar hijauan sangat luas dan terus lapar.

Sayangnya, banyak peternak masih kesulitan mendapatkan pasokan rutin. Selain soal kuantitas, tantangan distribusi juga menjadi kendala utama. Transportasi, cuaca, hingga minimnya pemain di sektor ini membuat hijauan berkualitas kerap langka di pasaran.

Inilah saatnya para pelaku usaha melihat hijauan pakan bukan sekadar rumput biasa, tapi sebagai komoditas strategis. Bisnis ini bukan cuma menopang peternakan, tapi juga bisa berdiri sendiri sebagai tulang punggung usaha agribisnis.

Inovasi dan Kolaborasi

Agar bisnis hijauan pakan semakin berkembang, diperlukan inovasi dalam teknik budidaya, distribusi, dan sistem penyediaannya. Strategi penyediaan hijauan siap saji dalam bentuk kemasan segar, silase, atau hay bisa jadi alternatif menarik, terutama untuk peternakan modern.

Jika semua pemangku kepentingan—petani, peternak, pemerintah, hingga penyuluh—bisa berjalan dalam satu irama, maka bisnis hijauan tak hanya akan tumbuh subur, tapi juga menciptakan ekosistem pertanian-peternakan yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, rumput pun bisa jadi emas, asal dikelola dengan serius. Sebab, di balik dedaunan itu, ada ladang hijau yang mengalirkan cuan.

Penulis : Yoceu Hadinovianti
Penyuluh Pusat BPPSDMP

Manfaat Dibalik Ampas Kopi

CATATAN Begawan



Penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer, Parkinson, dan Huntington memengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Kondisi ini perlahan-lahan menghancurkan sel-sel otak, yang menyebabkan masalah dengan ingatan, gerakan, bicara, dan bahkan fungsi dasar seperti kontrol kandung kemih.

Penyakit-penyakit ini juga menghabiskan biaya miliaran dolar bagi sistem perawatan kesehatan setiap tahunnya. Perawatan yang ada saat ini mahal dan lebih berfokus pada penanganan gejala daripada menghentikan penyakit.

Namun kini, sebuah studi baru yang mengejutkan dari Universitas Texas di El Paso menawarkan harapan baru. Dimulai dengan sesuatu yang kebanyakan dari kita buang setiap hari yakni ampas kopi bekas. Para peneliti telah menemukan senyawa yang ditemukan dalam sisa kopi tersebut (asam kafeat) dapat diubah menjadi partikel kecil yang disebut Titik Kuantum Karbon atau CACQD.

Partikel-partikel ini dapat melindungi otak dari jenis kerusakan yang menyebabkan penyakit seperti Parkinson dan Alzheimer. Lebih baik lagi, pendekatan baru ini murah, ramah lingkungan, dan didasarkan pada sesuatu yang jika tidak dimanfaatkan akan terbuang sia-sia.

CACQD dibuat dengan memanaskan bubuk limbah kopi hingga sekitar 200 derajat Celsius selama empat jam. Proses ini mengubah struktur karbon asam kafeat, membentuk titik-titik sangat kecil yang memiliki sifat antioksidan yang kuat.

Asam kafeat adalah polifenol sebagai senyawa alami yang ditemukan dalam kopi dan banyak buah, membantu melawan molekul berbahaya yang dikenal sebagai radikal bebas. Radikal bebas merusak sel, termasuk sel otak, dan diketahui berperan dalam proses penuaan dan penyakit otak.

CACQD tidak hanya menghilangkan molekul berbahaya ini tetapi juga menghentikan protein berbahaya menggumpal di dalam otak. Yang membuat CACQD sangat menjanjikan adalah kemampuannya untuk melewati sawar darah-otak. Ini adalah dinding alami yang melindungi otak dari zat-zat berbahaya, tetapi juga menyulitkan banyak obat untuk mencapai jaringan otak.

Karena CACQD dapat melewati sawar ini, mereka dapat secara langsung membantu sel-sel otak di tempat yang paling membutuhkannya. Mereka menemukan bahwa partikel tersebut melindungi sel otak dari kerusakan dan mencegah penumpukan protein berbahaya, tanpa efek samping yang signifikan.

Berdasarkan penelitian ini para ilmuwan percaya bahwa CACQD pada akhirnya dapat digunakan sebagai pengobatan pencegahan, terutama bagi orang-orang yang berisiko terkena penyakit otak karena usia, racun lingkungan, atau faktor gaya hidup. Tujuannya adalah untuk mengembangkan obat yang terjangkau dan mudah diminum.

Sumber: Knowridge Science Report

TARIF TRUMP,
TANTANGAN ATAU PELUANG



Awal April dunia perdagangan internasional dibuat kaget ketika Pemerintah AS resmi menerapkan tarif impor dan bea masuk terhadap barang impor. Kebijakan tersebut kemudian dikenal dengan "tarif Trump". Bagaimana dengan Indonesia, akankah ada peluang dibalik kebijakan tersebut?

Penerapan tarif Trump disampaikan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump pada Rabu (2/4) dalam suasana yang disebut "Hari Pembebasan" atau "Liberation Day". Trump mengeklaim, pungutan ini akan meningkatkan produksi dalam negeri dan menyamakan kedudukan dengan negara-negara lain yang mengenakan tarif lebih tinggi terhadap impor AS.

Berbagai reaksi pun timbul dari negara-negara di dunia. Dikutip dari BBC, Jumat (4/4), tarif Trump adalah persentase pajak yang dikenakan terhadap nilai suatu barang yang diimpor dari negara lain. Misalnya, tarif sebesar 25 % berlaku untuk produk impor seharga 10 dollar AS. Ini membuat harga produk itu dikenai biaya tambahan 2,5 dollar AS.

Trump menerapkan tarif impor 10 % terhadap negara-negara asing di dunia yang memperdagangkan produk-produk ke AS. Tarif universal 10 % ini berlaku efektif mulai Sabtu (5/4). Namun beberapa negara juga dikenakan tarif timbal balik khusus karena mereka telah memberlakukan tarif impor terhadap produk dari AS.

Tarif timbal balik berarti penerapan tarif tambahan sesuai yang dibebankan negara lain kepada AS dalam bentuk tarif impor, ditambah hambatan non-tarif seperti regulasi. Indonesia menjadi negara yang terkena tarif impor 32 %, sama dengan Taiwan. Bagaimana dampaknya dengan ekspor produk Indonesia, khususnya komoditas pertanian?

Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2024, nilai ekspor produk pangan-pertanian Indonesia ke AS meliputi minyak sawit dan turunannya 1,3 miliar dollar AS (4,9%), ban dari karet 800 juta dollar AS (3%), alas kaki bersol karet 792 juta dollar AS (3%) dan karet alam 673 juta dollar AS (2,6%).

Sedangkan produk perikanan seperti krustasea udang-kepiting 751 juta dollar AS (2,8%), krustasea lain—kerang-tiram dengan dan tanpa cangkang 685 juta dollar AS (2,6%). Imbas kebijakan tarif baru AS ini bakal menurunkan kinerja ekspor produk pangan penting seperti minyak sawit, produk dari karet, hasil laut dan karet alam yang selama ini menjadi andalan devisa Indonesia.

Turun Tangan Pemerintah

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono mengakui, dengan adanya tarif impor Presiden Trump ini justru membuat Malaysia sebagai produsen CPO terbesar kedua setelah Indonesia memiliki keuntungan lebih dalam bersaing di pasar AS. Pasalnya, tarif impor produk sawit Negeri Jiran itu hanya sebesar 24%, jauh lebih rendah dari Indonesia.

Karena itu, pihaknya telah mengusulkan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, untuk memberikan keringanan beban bagi eksportir sawit yang mengarah ke pasar AS. “Kebijakan semacam ini diperlukan untuk menjaga agar Indonesia tetap bisa mempertahankan pangsa pasarnya di Amerika Serikat,” ujarnya.

Komoditas perkebunan lainnya yang akan terimbas adalah kopi. Pelaku kopi Gayo sekaligus owner Asa Coffee, Armiyadi, memprediksi dampak pemberlakukan 32 persen pajak yang dikenakan AS terhadap barang-barang Indonesia akan berpengaruh pada harga kopi Gayo. Saat ini, banyak buyer dari AS meminta kepada Indonesia untuk mencari pembeli lain selain AS.

Bukan hanya Indonesia yang bakal terdampak pada ekspor kopi ke Negeri Paman Sam. Negara Vietnam menurut Armiyadi, justru terkena dampak lebih besar, karena terkena tarif sebesar 46 persen. Padahal negara tersebut merupakan produsen kopi terbesar ke dua di dunia.

“Secara logika, pasokan kopi Vietnam ke AS juga akan berkurang. Mereka pasti akan mencari negara lain yang mau membeli kopi mereka, yang jauh lebih murah pajaknya,” kata Armiyadi. Bahkan ia memperkirakan, Vietnam akan melempar kopi ke Indonesia. Imbas lebih jauhnya adalah kopi robusta yang harganya saat ini jauh lebih tinggi dari sebelumnya bakal kembali ke harga dasar Rp 30 ribu/kg.

Selain perkebunan, dunia perikanan dalam negeri juga akan terdampak cukup besar. Selama ini AS menjadi salah satu tujuan utama ekspor produk perikanan Indonesia. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan nilai ekspor ke AS tercatat mencapai 1,90 miliar dollar AS atau sekitar 31,97% dari total ekspor perikanan Indonesia. AS juga menjadi pasar terbesar udang, sekitar 63% dari total volume ekspor udang pada tahun 2024.

Karena itu, keputusan Trump mengenakan tarif 32% berpotensi mengguncang seluruh industri perikanan Tanah Air. Budhi Wibowo, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) mengatakan, tak hanya eksportir, sektor hulu seperti petambak dan nelayan juga akan merasakan dampaknya.

Di Indonesia, ada sekitar 2 juta nelayan yang mengandalkan hasil tangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika industri pengolahan perikanan terhenti, maka jutaan pekerjaan berisiko hilang, termasuk ribuan pekerja yang menggantungkan hidup di sektor ini. "Kita punya ratusan pabrik pengolahan ikan dan udang, mungkin sekitar 800 pabrik akan terkena dampak dan ratusan ribu pekerjaan bisa hilang," ungkap Budhi khawatir.

Dengan tarif yang semakin tinggi, Budi mengkhawatirkan sebagian besar pelaku usaha perikanan terpaksa menghentikan produksi. Saat ini menurutnya, beberapa buyer sudah mulai membatalkan kontrak ekspor, sementara yang lainnya memilih untuk menunda pengiriman barang.

Menanggapi kondisi yang bakal dialami pelaku usaha, Pengamat Ekonomi Pertanian, Prof. Bustanul Arifin berharap pemerintah untuk mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha untuk berunding dan menyelesaikan kontrak dagang yang telah disepakati sebelumnya.

Pemerintah dan dunia usaha dibantu akademisi perlu terus-menerus melakukan diplomasi, berunding dengan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR=United States Trade Representatives). “Usulan-usulan konkret kerja sama perlu disampaikan untuk meringatkan dampak bagi perekonomian Indonesia,” ujarnya. **Yul**

Industri Sawit Meradang, tapi Ada Peluang

Tarif impor 32% yang Presiden Trump terapkan kepada Indonesia membuat industri sawit Indonesia meradang. Dampaknya langsung menghantam ekspor produk minyak sawit Indonesia yang berimbas pada biaya produksi. Di tengah kekhawatiran berkurangnya pasar, ada peluang yang bisa dimanfaatkan.

Keputusan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk menetapkan tarif impor 32% mulai memberikan dampak yang cukup signifikan bagi industri kelapa sawit nasional. Di satu sisi memang keputusan ini mempengaruhi potensi ekspor produk sawit Indonesia ke AS, bahkan membuka peluang negara lain, khususnya Malaysia merebut pasar yang sebelumnya dikuasai Indonesia.

Dalam industri kelapa sawit global, Indonesia memang dikenal sebagai salah satu produsen terbesar CPO (Crude Palm Oil) dunia, namun dengan kebijakan tarif impor yang diberlakukan oleh AS, ada risiko Indonesia akan kehilangan sebagian pasar sawitnya. Meski AS hanya menyumbang kurang dari 5% dari total ekspor sawit Indonesia, dampak tarif 32% bisa cukup besar bagi industri sawit Indonesia secara keseluruhan.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyebutkan Malaysia sebagai produsen CPO terbesar kedua setelah Indonesia, memiliki keuntungan lebih dalam bersaing di pasar AS. Pasalnya, tarif impor produk sawit Negeri Jiran itu hanya sebesar 24%, jauh lebih rendah dari Indonesia.

Alasan utama yang membuat tarif ini menjadi masalah adalah adanya ketimpangan beban yang harus ditanggung industri sawit Indonesia dibandingkan dengan Malaysia. Di Indonesia, pengusaha sawit yang berorientasi ekspor harus menghadapi tiga beban utama yakni, Domestic Market Obligation (DMO), Pungutan Ekspor (PE), dan Bea Keluar (BK). Ketiga beban ini totalnya bisa mencapai sekitar 221 dollar AS/ton.

Sementara itu, di Malaysia, meskipun kebijakan yang berlaku serupa, total beban yang harus ditanggung pengusaha sawit di sana lebih ringan, hanya sekitar 140 dollar AS/ton. Beban yang lebih tinggi ini menyebabkan harga jual produk sawit Indonesia menjadi lebih mahal, sehingga daya saingnya di pasar global, terutama di pasar AS, tergerus.

Ketua GAPKI, Eddy Martono mengungkapkan, pihaknya telah mengusulkan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, untuk memberikan keringanan beban bagi eksportir sawit yang mengarah ke pasar AS. Kebijakan semacam ini diperlukan untuk menjaga agar Indonesia tetap bisa mempertahankan pangsa pasarnya di Amerika Serikat.

Pangkas Pendapatan Petani

Menurut Ketua Umum Asosiasi Petani Sawit Indonesia (APKASINDO), Gulat Manurung, adanya tarif baru ini dapat berakibat pada peningkatan biaya produksi minyak sawit hingga 20%. Peningkatan biaya produksi ini, dapat menurunkan margin keuntungan petani sawit yang sudah cukup terbebani dengan harga pupuk dan obat-obatan yang sebagian besar diimpor.

Dengan meningkatnya biaya produksi, Gulat memperkirakan pendapatan petani bisa berkurang, yang pada gilirannya akan berdampak pada kesejahteraan mereka. Seperti diketahui, sekitar 42% atau 6,8 juta ha dari total luas perkebunan sawit Indonesia adalah milik petani sawit rakyat. Kebun sawit rakyat ini memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap total produksi CPO Indonesia.

Dalam situasi ini, petani yang lebih bergantung pada hasil kebun untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari akan merasakan dampak yang lebih besar dari kebijakan tarif impor tersebut. “Biaya produksi yang naik akan menyebabkan pendapatan petani yang sebelumnya memiliki margin sekitar Rp 800 per kilogram bisa berkurang menjadi hanya Rp 600 per kilogram,” ungkap Gulat.

Hal ini Gulat mengkhawatirkan, memperburuk kondisi petani sawit yang sudah menghadapi berbagai tantangan dalam memproduksi CPO dengan biaya yang cukup tinggi. Bahkan peningkatan biaya produksi ini juga dapat menyebabkan petani terpaksa melakukan efisiensi dalam perawatan kebun, seperti mengurangi jumlah pupuk dan obat.

Jika hal ini terus berlanjut, produktivitas kebun sawit rakyat diperkirakan bisa berkurang hingga 7%. Berkurangnya produktivitas tentu akan berdampak langsung pada pendapatan petani, yang berujung pada menurunnya kesejahteraan mereka.

Ada Peluang

Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Tungkot Sipayung, menilai, meskipun volume ekspor sawit Indonesia ke AS relatif kecil, kebijakan tarif resiprokal ini bisa menciptakan risiko baru yang cukup kompleks dalam perdagangan internasional.

“Jika kebijakan tarif ini berdampak pada berkurangnya volume ekspor sawit Indonesia ke AS, maka negara-negara lain yang sebelumnya menjadi konsumen minyak sawit Indonesia bisa menjadi alternatif tujuan ekspor yang lebih potensial,” tuturnya.

Namun, di sisi lain, kondisi ini bisa membuka peluang bagi industri sawit Indonesia untuk memperbesar pangsa pasar di negara-negara seperti China, India, dan Eropa. Catatannya, jika negara-negara tersebut merespons kebijakan Trump dengan menaikkan tarif impor kedelai dari AS.

Data GAPKI menyebutkan, nilai ekspor produk sawit pada tahun 2024 adalah 27,76 miliar dollar AS (Rp 440 triliun). Angkan itu lebih rendah 8,44% dari ekspor tahun 2023 sebesar 30,32 dollar AS miliar (Rp 463 triliun). Dengan produksi, konsumsi dan ekspor demikian, stok CPO dan PKO diakhir tahun 2024 sebesar 2.577 ribu ton yang lebih rendah 18,06% dari stok akhir 2023 sebesar 3.145 ribu ton

Dalam hal ini, Indonesia bisa mengambil kesempatan untuk meningkatkan ekspor sawit ke negara-negara tersebut yang membutuhkan minyak nabati dalam jumlah besar. Secara keseluruhan, industri sawit Indonesia menghadapi tantangan yang cukup berat, baik dari faktor eksternal seperti kebijakan tarif AS maupun faktor internal seperti penurunan produktivitas.

Namun, dengan adanya upaya dari GAPKI dan asosiasi terkait untuk mencari solusi atas tarif yang diberlakukan, serta potensi peluang yang bisa dimanfaatkan dalam pasar global, diharapkan industri sawit Indonesia masih bisa bertahan dan berkembang meski di tengah situasi yang penuh tantangan. **Gsh/Yul**



Industri Perikanan Terancam Tenggelam

Tarif 32% yang Presiden AS Donald Trump terapkan untuk Indonesia memicu ancaman serius bagi industri perikanan. Ini menjadi sebuah tantangan besar bagi para pengusaha perikanan Tanah Air yang mengandalkan pasar ekspor, ke Amerika Serikat. Mereka harus menyusun strategi baru agar tidak tenggelam.



Selama Tahun 2024, Amerika Serikat menjadi salah satu tujuan utama ekspor produk perikanan Indonesia. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), nilai ekspor Indonesia ke AS tercatat mencapai 1,90 miliar dollar AS atau sekitar 31,97% dari total ekspor perikanan. Tidak hanya itu, AS juga menjadi pasar terbesar untuk udang Indonesia, mencakup sekitar 63% dari total volume ekspor udang pada tahun 2024.

Namun, keputusan Trump mengenakan tarif 32% berpotensi mengguncang seluruh industri perikanan Tanah Air. Para pelaku usaha perikanan, mulai dari nelayan, petambak, hingga eksportir, kini terjebak dalam ketidakpastian.

Bagaimana tidak, tarif tersebut tidak hanya akan meningkatkan biaya produksi, tapi juga membuat produk perikanan semakin tidak kompetitif di pasar global. Ketergantungan Indonesia terhadap pasar AS berubah drastis, menjadi ancaman keberlanjutan industri yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia.

Bagi Budhi Wibowo, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I), kebijakan tarif ini sangat membebani pelaku usaha, terutama yang memiliki margin keuntungan tipis di bawah 5%. "Jika kami harus menurunkan harga, maka petambak dan nelayan pun tidak akan sanggup menanggung beban tarif 32%," ujarnya.

Tak hanya eksportir, sektor hulu seperti petambak dan nelayan juga akan merasakan dampaknya. Di Indonesia, ada sekitar 2 juta nelayan yang mengandalkan hasil tangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika industri pengolahan perikanan terhenti, maka jutaan pekerjaan berisiko hilang, termasuk ribuan pekerja yang menggantungkan hidup di sektor ini.

"Kita punya ratusan pabrik pengolahan ikan dan udang, mungkin sekitar 800 pabrik. Jika terkena dampak, ratusan ribu pekerjaan bisa hilang," ungkap Budhi khawatir.

Efek Domino

Dengan tarif yang semakin tinggi, Budi mengkhawatirkan sebagian besar pelaku usaha perikanan terpaksa menghentikan produksi. Saat ini menurutnya, beberapa buyer sudah mulai membatalkan kontrak ekspor, sementara yang lainnya memilih untuk menunda pengiriman barang.

"Ini tentu mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia, terutama bagi daerah-daerah yang sangat bergantung pada ekspor produk perikanan, seperti Nusa Tenggara Barat," ujarnya. Di NTB, komoditas perikanan seperti udang dan ikan tuna menjadi primadona ekspor ke AS. Namun, dengan adanya tarif 32%, pengurangan volume ekspor menjadi hal yang tak terhindarkan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Muslim mengungkapkan, dampak tarif tinggi ini sudah mulai terasa. Perusahaan seperti PT. High Point Fisheries, yang sebelumnya mengandalkan pasar AS, kini harus mencari alternatif pasar untuk menghindari kerugian lebih lanjut.

Namun, Muslim juga optimis bahwa eksportir perikanan di NTB sudah menyiapkan langkah mitigasi, salah satunya dengan menjajaki pasar-pasar lain di Asia dan Eropa. Jepang dan China, misalnya, menjadi pasar potensial yang bisa dimanfaatkan eksportir NTB.

Kondisi ini tentu saja tidak hanya berdampak pada eksportir besar dan pengusaha perikanan, tetapi juga menyasar ribuan pekerja yang menggantungkan hidupnya pada industri ini. Dari petambak ikan, nelayan, hingga pekerja pabrik pengolahan ikan dan udang, semua berisiko kehilangan pekerjaan jika tarif ini terus diberlakukan.

Diversifikasi Pasar

Untuk jangka pendek, pengusaha perikanan memang tidak tinggal diam. Banyak yang mulai merencanakan diversifikasi pasar ekspor. Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Dani Setiawan mengungkapkan, Indonesia harus segera mengalihkan sebagian besar ekspor perikanannya ke negara-negara lain, seperti Jepang, China, dan Malaysia.

"Pemerintah harus segera menjalin kerja sama perdagangan yang lebih konkret untuk memperluas pasar ke negara-negara seperti Inggris, Belanda, Denmark, dan Jerman," ujar Dani, seraya menambahkan bahwa negara-negara ini memiliki potensi pasar yang cukup besar untuk produk udang olahan Indonesia.

Dani juga menyarankan agar pengusaha perikanan Indonesia lebih agresif dalam mencari peluang pasar baru. Misalnya, negara-negara Eropa yang selama ini memiliki permintaan tinggi terhadap produk udang olahan.

Meskipun begitu, tantangan utama tetap ada. Selain tarif yang tinggi, produk udang Indonesia juga harus bersaing dengan negara-negara lain seperti Ekuador, India, dan Vietnam yang juga menjadi pemain utama di pasar global.

Dengan sektor perikanan yang terancam gulung tikar, pemerintah Indonesia juga diharapkan untuk memberikan dukungan yang lebih besar kepada sektor ini. Salah satunya melalui insentif fiskal, seperti meniadakan pajak penghasilan (PPh 22) untuk pembelian produk perikanan dan bahan baku.

Selain itu, memberikan relaksasi pembayaran pajak badan bagi perusahaan pengolahan perikanan. Dukungan perbankan yang memperpanjang waktu pembayaran dan menawarkan bunga rendah juga sangat dibutuhkan agar pengusaha dapat bertahan dalam situasi yang sulit ini. **Gsh/Yul**

Diplomasi jadi Jalan Terbaik



Negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat menjadi satu-satunya solusi yang bisa diambil Indonesia untuk melindungi sektor perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah mengusulkan jalur diplomasi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, untuk meredakan dampak dari tarif yang ditetapkan AS.

"Memang cara satu-satunya adalah negosiasi," kata Trenggono saat ditemui di Jakarta. Pemerintah Indonesia, di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, kini berusaha sekuat tenaga untuk mengurangi dampak dari kebijakan tarif ini. Namun, selain negosiasi, langkah jangka panjang juga diperlukan, salah satunya dengan memperkuat konsumsi ikan dalam negeri.

Trenggono menuturkan, upaya memperkuat konsumsi ikan di dalam negeri dapat menjadi alternatif yang efektif untuk menanggulangi dampak dari kebijakan AS. Dengan meningkatkan konsumsi ikan lokal, Indonesia bisa mengurangi ketergantungan pada pasar ekspor, khususnya ke AS.

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mendorong program-program untuk memasyarakatkan konsumsi ikan yang bergizi tinggi di kalangan masyarakat Indonesia. Selain itu, sektor perikanan juga dipandang sebagai salah satu pilar yang berpotensi mengurangi angka stunting di Indonesia. Apalagi meningkatkan konsumsi ikan dapat menjadi salah satu cara untuk menciptakan pola makan yang lebih sehat dan bergizi bagi masyarakat. **Gsh/Yul**

Rekomendasi Hadapi Serangan Tarif Trump



Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menawarkan rekomendasi strategis untuk menghadapi dampak serangan tarif dagang yang diterapkan Presiden AS Donald Trump. Rekomendasi tersebut demi melindungi sektor pertanian dan ekonomi nasional.

Di balik kebijakan proteksionis Presiden AS, banyak yang khawatir kebijakan dagang Negeri Paman Sam ini dapat merugikan petani dan pelaku UKM pangan di Indonesia. Kebijakan tarif ini menjadi tantangan besar bagi perekonomian Indonesia. Khususnya sektor pertanian dan usaha kecil menengah (UKM).

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI), Fadli Zon akhirnya buka suara. Ia menyampaikan langkah strategis untuk melindungi petani dan UKM pangan Indonesia dari gempuran kebijakan perdagangan AS yang semakin proteksionis.

Langkah-langkah ini tidak hanya bertujuan menjaga ketahanan ekonomi nasional, tapi juga untuk memastikan sektor pertanian Indonesia tetap bertumbuh dan mampu bersaing di tingkat global. "Sektor pertanian Indonesia memiliki potensi besar yang perlu dimaksimalkan, terutama dalam menghadapi proteksionisme yang semakin ketat di berbagai negara," ujarnya.

Inilah Rekomendasinya

Rekomendasi tersebut, pertama, diplomasi perdagangan yang lebih progresif. Fadli Zon menegaskan, Indonesia perlu mengintensifkan diplomasi perdagangan internasional yang lebih progresif. Diplomasi yang selama ini cenderung bersifat reaktif perlu diubah menjadi lebih proaktif. Artinya, Indonesia harus lebih aktif dalam mempengaruhi kebijakan perdagangan internasional agar kesejahteraan petani menjadi fokus utama dalam setiap negosiasi dagang.

Dengan membawa semangat trade for development (perdagangan untuk pembangunan), Indonesia bisa memastikan agar kebijakan perdagangan yang diambil tidak hanya menguntungkan negara-negara besar, tapi juga mendukung sektor pertanian Indonesia.

"Diplomasi yang lebih progresif ini harus mencakup kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak, tidak hanya menguntungkan negara besar seperti Amerika Serikat, tapi juga memberikan perlindungan dan keuntungan bagi petani serta pelaku UKM di Indonesia," ujar Fadli.

Kedua, diversifikasi pasar ekspor. Salah satu hal yang disoroti Fadli adalah ketergantungan Indonesia pada pasar tunggal seperti AS. Ketergantungan yang terlalu tinggi pada satu pasar ekspor bisa menjadi bumerang jika ada kebijakan proteksionis dari negara tersebut.

Karena itu, Fadli mendorong pemerintah untuk memperluas penetrasi pasar ekspor Indonesia ke kawasan ASEAN, Pasifik, bahkan Afrika. Hal ini tidak hanya akan mengurangi risiko kebijakan proteksionis negara-negara besar, tapi juga membuka peluang pasar baru yang lebih beragam untuk produk pertanian Indonesia.

"Dengan memperluas pasar ekspor, Indonesia bisa mengurangi ketergantungan pada satu negara, sekaligus meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia di pasar internasional," tuturnya.

Ketiga, penguatan daya beli dan produktivitas domestik. Fadli Zon menekankan perlunya program insentif untuk meningkatkan daya beli masyarakat, seperti program makan bergizi gratis dan bantuan sosial. Program-program ini dapat meningkatkan konsumsi masyarakat dan juga menyerap hasil produksi petani lokal.

Fadli juga mengusulkan penerapan pola intercropping (tanaman sela) di lahan perkebunan serta pendekatan pertanian regeneratif di lahan-lahan kritis. Dengan cara ini, produksi pertanian bisa meningkat secara berkelanjutan dan mampu memenuhi kebutuhan domestik dengan kualitas yang baik, sambil tetap menjaga keberlanjutan lingkungan.

Akselerasi Sektor Riil

Keempat, akselerasi sektor riil lewat stimulus fiskal dan nonfiskal. HKTI mengusulkan perlunya langkah konkret untuk mempercepat penguatan sektor riil. Salah satunya dengan memberikan stimulus fiskal dan nonfiskal untuk koperasi tani, pengusaha kecil, dan industri pertanian rumahan.

"Koperasi tani dan usaha kecil sangat berperan dalam mendongkrak perekonomian lokal, dan dengan adanya stimulus ini, mereka bisa lebih berkembang dan berdaya saing. Stimulus ini juga bisa mencakup pelatihan, pengembangan kapasitas produksi, serta akses ke pasar yang lebih luas bagi produk-produk hasil pertanian," tuturnya.

Kelima, hilirisasi berbasis koperasi petani. Hilirisasi atau pengolahan produk pertanian menjadi produk jadi yang memiliki nilai tambah, menurut Fadli, menjadi salah satu solusi penting yang perlu diterapkan. Dengan cara ini, nilai tambah yang dihasilkan dari produk pertanian tidak hanya dinikmati perusahaan besar, tapi juga kembali ke tangan para petani.

Melalui koperasi, petani akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari hasil olahan produk pertanian mereka. Hal ini juga akan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar domestik maupun internasional.

Keenam, tarif resiprokal untuk impor AS. Menyikapi kebijakan tarif tinggi AS terhadap komoditas seperti CPO, karet, dan kopi, Fadli Zon menyarankan agar Indonesia menerapkan tarif resiprokal terhadap produk pertanian dari Amerika Serikat, seperti kedelai, gandum, dan jagung. "Jika AS menerapkan tarif tinggi terhadap komoditas Indonesia, maka Indonesia harus menerapkan kebijakan yang serupa terhadap produk-produk pertanian AS," tegasnya.

Alternatif lainnya adalah membuka pasar Indonesia dengan syarat penghapusan tarif atas komoditas unggulan Indonesia. Hal ini penting agar Indonesia bisa mendapatkan posisi tawar yang lebih kuat dalam perdagangan global, serta menjaga kesejahteraan petani dan pelaku UKM di tanah air.

Fadli Zon menegaskan, tantangan global seperti kebijakan tarif Trump bukan hanya sebuah ancaman, tetapi juga sebuah peluang. Selama pemerintah bergerak cepat dengan strategi yang tepat, sektor pertanian Indonesia bisa tumbuh lebih kuat dan mandiri. Dalam menghadapi badai proteksionisme internasional, Indonesia harus dapat memanfaatkan momen ini untuk memperkuat posisi tawar dan memastikan sektor pertanian Indonesia tetap berkembang di tengah krisis global. **Gsh/Yul**

DAFTAR NEGARA-NEGARA DIKENAI TARIF BARU TRUMP

Negara	Tarif Impor Barang dari AS	Tarif timbal Balik yang dikenakan AS
Kamboja	97%	49%
Vietnam	90%	46%
Sri Langka	88%	44%
Bangladesh	74%	37%
Thailand	72%	36%
China	67%	34%
Taiwan	64%	32%
Indonesia	**64%**	**32%**
Pakistan	58%	29%
India	52%	26%
Korea Selatan	50%	25%
Malaysia	47%	24%
Jepang	46%	24%
Uni Eropa	39%	20%
Filipina	34%	17%
Israel	33%	17%
Singapura	10%	10%

Jelang Musim Tanam, Ketersediaan Pupuk Kembali jadi Sorotan



Beberapa wilayah sentra produksi padi, kini telah memasuki musim panen. Sebagian petani juga langsung menggarap lahannya untuk memulai musim tanam berikutnya. Salah satu yang menjadi kekhawatiran petani adalah ketersediaan pupuk. Apalagi pemerintah baru mengubah sistem distribusinya.

Bagi petani, sarana produksi pupuk sangat vital dalam usaha tani. Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, petani kerap mengeluhkan ketersediaannya yang tepat, baik waktu maupun jumlahnya. Guna mengatasi persoalan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.

Perpres yang ditandatangani 30 Januari 2025 bertujuan untuk memastikan penyaluran pupuk yang lebih efisien dan tepat sasaran. Seperti diketahui dalam penyaluran pupuk harus memenuhi 6 T (tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu).

Persoalan distribusi memang menjadi kendala tantangan utama. Keampuhan Perpres Tata Kelola Pupuk Bersubsidi tersebut bakal diuji pada musim tanam gadu tahun ini. Pasalnya, kebijakan pemerintah yang membuka kesempatan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) menjadi penyalur pupuk subsidi, ternyata tak mudah.

Banyak Gapoktan yang belum siap dengan berbagai alasan. Salah satunya permodalan. Dengan keterbatasan modal membuat Gapoktan sulit memenuhi persyaratan menyediakan stok untuk 1 minggu ke depan. Masalah SDM pengelola Gapoktan juga menjadi persoalan tersendiri.

Berdasarkan data Simluhtan, kelembagaan petani saat ini yang berbentuk Poktan sebanyak 755.542 unit, Gapoktan 64.723 unit, KEP 14.301 unit dan yang berbentuk Badan Hukum Koperasi sebanyak 5.063 unit. Dari data tersebut, jumlah Gapoktan yang telah memiliki legalitas masih sangat sedikit. Padahal legalitas dalam bentuk badan hukum menjadi persyaratan menjadi penyalur pupuk subsidi.

Permentan Terbaru

Untuk memastikan kelancaran Musim Tanam II (MT II) yang dimulai pada April dan sebagai kebijakan turunan dari Perpres No. 6 Tahun 2025, Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 4 Tahun 2025 tentang Penetapan Alokasi dan HET Pupuk Subsidi. Dalam regulasi terbaru tersebut, ada fleksibilitas pemutakhiran data eRDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sepanjang tahun.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Kementerian Pertanian, Andi Nur Alam Syah mengatakan, kebijakan terbaru bertujuan untuk meningkatkan ketepatan sasaran dalam penyaluran pupuk subsidi, terutama pada MT II yang dimulai April. Dengan adanya fleksibilitas dalam pemutakhiran eRDKK, data penerima pupuk subsidi bisa terus diperbarui sesuai kondisi di lapangan. “Ini memastikan petani yang benar-benar membutuhkan dapat mengakses pupuk secara tepat waktu dan sesuai alokasi,” ujarnya.

Ia menilai, sistem ini juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi pupuk, sehingga dapat meminimalkan potensi kesalahan data atau penyimpangan. Bahkan Andi Nur juga berharap, kebijakan ini dapat memperlancar distribusi pupuk subsidi bagi petani. Salah satu langkah utama yang diterapkan adalah pembaruan data eRDKK secara berkala setiap tiga bulan agar penebusan pupuk lebih mudah dan akurat.

“Kami ingin memastikan petani tidak mengalami kendala dalam mendapatkan pupuk. Dengan data yang selalu diperbarui, mereka bisa menebus pupuk tanpa hambatan administratif,” ujar Andi Nur.

Salah satu perubahan utama dalam kebijakan ini adalah mekanisme penebusan pupuk yang kini lebih sederhana. Petani cukup membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai syarat, asalkan sudah terdaftar dalam sistem Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (eRDKK).

Tatang Suherli, petani dari Kelompok Tani Mekar Rahayu, Kecamatan Rancaekek, mengaku lebih tenang karena proses penebusan pupuk kini lebih mudah. Dengan luas lahan 2 ha, ia membutuhkan 500 kg urea dan 500 kg NPK. “Dulu, kadang harus bolak-balik untuk memastikan kuota pupuk tersedia. Sekarang, cukup pakai KTP dan datanya sudah sesuai dengan yang kami ajukan. Jadi lebih praktis,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Santi Indrianti, Penyuluh Pertanian Lapang (PPL) Desa Rancaekek Kulon. Menurutnya, kebijakan ini sangat membantu petani dalam mendapatkan pupuk subsidi tanpa terkendala administrasi. “Dengan data eRDKK yang diperbarui rutin, petani tidak lagi kebingungan saat menebus pupuk. Prosesnya lebih lancar, dan mereka bisa mendapatkan pupuk sesuai kebutuhan tanpa kendala birokrasi,” katanya.

Sementara itu Syahrudin, Ketua Kelompok Tani Harapan Kita, Kelurahan Talotenreng, Kecamatan Sabbang Paru, Kabupaten Wajo mengakui, akses terhadap pupuk subsidi kini semakin mudah dan lancar, terutama menjelang Musim Tanam April. "Penebusan pupuk kini sangat mudah, dan komunikasi antara pengecer dan distributor berjalan dengan baik. Kami tidak lagi mengalami keterlambatan dalam mendapatkan pupuk," ujarnya.

Syahrudin menambahkan, kebijakan ini memastikan semua petani yang terdaftar dalam eRDKK mendapatkan pupuk subsidi tepat waktu. Pengecer juga semakin aktif berkoordinasi dengan petani mengenai jadwal tanam dan distribusi pupuk untuk mendukung keberhasilan Musim Tanam April. “Kami tidak ragu lagi dengan ketersediaan pupuk, dan sejauh ini tidak ada petani di Kabupaten Wajo yang mengalami kekurangan pupuk,” jelasnya.

Meski beberapa daerah petani sudah mulai merasakan adanya perubahan dalam distribusi pupuk subsidi. Namun Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Barat, Otong Wiranta mengingatkan, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan. Selama ini ia melihat masih lemahnya pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi.

Padahal menurut Otong, tindakan pencegahan dan pembinaan sangat diperlukan, sehingga pelaksanaan penyaluran bisa berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena itu, ia berharap pemerintah melibatkan perwakilan petani dalam KP3 sangat diperlukan. Dengan demikian, bisa mendeteksi secara dini kemungkinan pelanggaran yang terjadi di lapangan. **Yul**

Jambore Perhiptani Jawa Barat 2025:

Menyatukan Semangat, Menguatkan Kolaborasi



Sebuah momen penting akan segera digelar Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) Jawa Barat. Bertajuk Jambore Penyuluh Pertanian Jawa Barat 2025, acara ini akan berlangsung pada 28-30 April 2025 di Kebun Raya Kuningan. Kegiatan ini menjadi ajang menyatukan semangat dan menguatkan kolaborasi.

Sebanyak 1.000 penyuluh dari berbagai daerah di Jawa Barat akan berkumpul dalam ajang yang bukan hanya sekadar temu kangen, tetapi juga wahana refleksi, sinergi, serta penguatan peran penyuluh di tengah tantangan pertanian masa kini.

Ketua Pelaksana Jambore Perhiptani Jawa Barat 2025, Iskandar mengungkapkan, kegiatan ini akan menjadi titik temu penting bagi para penyuluh pertanian. “Jambore ini adalah ajang silaturahmi, evaluasi capaian, sekaligus refleksi bersama. Di sini, kita merenung dan berdiskusi, seperti apa seharusnya penyuluh berperan ke depan dalam pembangunan pertanian nasional?” ujarnya saat podcast dengan Tabloid Sinar Tani, Kamis (10/4).

Kegiatan jambore ini diperkirakan akan menyedot perhatian besar. Dari total sekitar 3.000 penyuluh di Jawa Barat, Iskandar yakin sebanyak 1.000 peserta akan hadir mewakili 27 kabupaten/kota. Bahkan pada acara pembukaan 7 Mei diprediksi akan dihadiri lebih dari dua kali lipat jumlah tersebut. Direncanakan akan hadir seluruh penyuluh dari kabupaten di sekitar Kuningan seperti Cirebon dan Majalengka, serta masyarakat umum.

Konsep acara dikemas menarik dan dinamis, termasuk kegiatan utama seperti temu penyuluh, perlombaan seni dan olahraga antar kabupaten, hingga pameran produk pertanian. Bahkan, peserta akan tinggal di tenda selama tiga hari, meniru suasana perkemahan ala Pramuka. “Kami ingin peserta kembali ke alam, menyatu dengan lingkungan, sehingga menjadi sebuah pendekatan simbolik bahwa pekerjaan penyuluh memang dekat dengan alam dan masyarakat tani,” ujarnya.

Salah satu agenda unggulan adalah dialog interaktif antara penyuluh dan para pemangku kebijakan, baik dari Kementerian Pertanian maupun pemerintah provinsi. Sesi ini bertujuan menyelaraskan pemahaman dan visi antara pemerintah pusat dan para pelaksana di lapangan. “Kami ingin para penyuluh tahu langsung arah kebijakan pemerintah, dan sebaliknya, pihak kementerian juga bisa mendengar aspirasi penyuluh di daerah,” tutur Iskandar.



Untuk memperluas jangkauan, acara ini juga akan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube. Penyuluh dari provinsi lain pun bisa menyaksikan dan mengikuti secara daring, menjadikan Jambore ini sebagai kegiatan berskala nasional. Direncanakan Tabloid Sinar Tani sebagai media yang selama ini menjadi bacaan penyuluh pertanian akan melakukan liputan khusus.

Ajang Kebangkitan Penyuluh

Sebagai tombak pembangunan pertanian di Indonesia, Iskandar menilai, petani akan mendapatkan edukasi dari penyuluh pertanian, termasuk bagaimana inovasi diperkenalkan, dan kebijakan pemerintah dijalankan. Karena itu, Jambore ini bukan hanya acara biasa, tapi simbol kebangkitan dan penyegaran semangat para penyuluh.

“Kami ingin kegiatan ini menjadi suntikan motivasi baru. Penyuluh yang pulang dari jambore ini akan membawa semangat, ilmu baru, dan rasa kebersamaan yang kuat,” ucap Iskandar.

Ketua Sterring Committee Jambore Penyuluh, Duddy S. Tafajani menambahkan, Jambore Penyuluh merupakan ajang pertemuan akbar dan berkemah yang meriah, difokuskan untuk integrasi antar penyuluh se-Jawa Barat. Jambore ini juga menjadi forum silaturahmi untuk bertukar pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam suasana keakraban dan kebersamaan.

Jenis kegiatan antara lain rembug penyuluh, temu usaha, apel siaga, kunjungan lapangan, dan berbagai lomba seperti lomba inovasi penyuluh, lomba vlog, capacity building, serta lomba untuk menyalurkan minat dan bakat seni dan olahraga.

Dukungan Pusat dan Daerah

Jambore ini mendapat perhatian dan dukungan besar dari berbagai level pemerintahan. Direncanakan hadir Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono; Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti; Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi serta sejumlah kepala daerah dari kabupaten/kota di Jabar.

Deni Pringadi, Ketua DPW Perhiptani Kabupaten Kuningan, menyampaikan kesiapan pihaknya sebagai tuan rumah. “Kami di Kuningan telah menyiapkan berbagai hal teknis maupun non-teknis. Dukungan penuh dari pemerintah daerah, termasuk camat dan desa sekitar Kebun Raya, menjadi kekuatan besar bagi suksesnya acara ini,” kata Deni.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini dirancang berbeda dari jambore sebelumnya. “Kami ingin menghadirkan jambore yang tidak hanya seremonial, tapi juga memberikan dampak nyata bagi peningkatan kapasitas dan semangat kerja para penyuluh,” tegasnya.

Selain menjadi ajang internal bagi penyuluh, kegiatan ini juga menyasar masyarakat sekitar. Karena itu akan digelar Pameran Produk Pertanian dari kelompok tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dan Kelompok Wanita Tani (KWT) se-Kabupaten Kuningan. Produk olahan lokal akan ditampilkan dalam bazar khusus, yang bertujuan mengenalkan potensi daerah sekaligus memberikan peluang promosi dan jejaring pemasaran.

Tak hanya itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) turut mendukung acara melalui kegiatan Gelar Pangan Murah. ”Kami akan melibatkan masyarakat dari tiga kecamatan sekitar Kebun Raya Kuningan akan dilibatkan untuk meramaikan acara dan memanfaatkan fasilitas pangan murah yang disediakan,” kata Deni.

Dengan dukungan yang kuat, konsep acara yang matang, serta semangat gotong royong dari para penyuluh dan pemerintah daerah, Jambore Penyuluh Pertanian Jawa Barat 2025 siap menjadi momentum penting bagi kebangkitan penyuluhan pertanian di Indonesia.

Herman/Yul



Bangun Maura Farm, Sumartono, dari Hobi jadi Bisnis

Berawal dari sebuah persiapan pensiun, Sumartono mendirikan Maura Farm pada 12 Agustus 2017, bertepatan dengan hari kelahiran putrinya. Tak hanya sebagai usaha, Maura Farm menjadi wujud kecintaannya terhadap dunia pertanian hidroponik yang kini berkembang pesat.

Selain hidroponik, awalnya Sumartono mencoba berbagai bidang usaha, seperti pembesaran ayam broiler dan cuci mobil/ motor online. Namun, hanya satu yang bertahan hingga kini yaitu hidroponik. "Hidroponik saya pilih karena passion saya paling besar di bidang ini," ujarnya ketika Tabloid Sinar Tani berkunjung ke lokasi usahanya.

Sebelum terjun ke dunia pertanian, Sumartono memiliki latar belakang di bidang telekomunikasi,. Namun, minatnya terhadap hidroponik mulai tumbuh sejak ia mengikuti pelatihan sebelum pensiun.

Dari sekadar hobi dengan menanam di pekarangan rumah, ia kemudian membangun sistem hidroponik di rooftop. Seiring berjalannya waktu, permintaan sayur dari tetangga terus meningkat, sehingga ia mulai serius mengembangkan bisnis ini.

Kini, Maura Farm memiliki dua lokasi kebun utama di Pedurenan dan Cimuning, Kota Bekasi. Di Pedurenan, luas lahan sekitar 400 meter persegi dengan 8.000 lubang tanam, sementara di Cimuning mencapai 700 meter persegi dengan lebih dari 20.000 lubang tanam. "Awalnya saya hanya menanam untuk konsumsi pribadi, tetapi lama-kelamaan tetangga dan teman-teman mulai tertarik membeli. Dari sanalah bisnis ini berkembang," katanya.

Maura Farm menanam berbagai jenis sayuran hidroponik, baik oriental maupun western. Sayuran oriental meliputi kangkung, bayam merah, bayam hijau, bayam batik, pakcoy, caisim, sawi keriting, samhong, hingga kale. Sementara itu, untuk jenis western, terdapat berbagai varian selada seperti selada keriting, endive, romaine, dan siomak.

Dalam perjalanan usahanya, Sumartono mengalami tantangan dalam pemasaran. "Di awal, hasil panen saya melimpah, tetapi saya kesulitan menjualnya. Akhirnya, saya berbagi hasil panen ke masjid, gereja, panti asuhan, dan tetangga sekitar. Itu menjadi strategi yang tidak saya rencanakan, tetapi justru membantu saya dikenal lebih luas," ujarnya.

Kini, Maura Farm telah memiliki jaringan pasar yang kuat, di mana pembeli langsung mencari produknya. Harga jual sayuran bervariasi, tergantung pada jenis dan volume pembelian. Misalnya, bayam hijau dijual Rp30.000 per kilogram untuk pengguna langsung, sementara reseller mendapat harga lebih murah, sekitar Rp18.000-Rp20.000 per kilogram.

"Saya sadar bahwa kunci bisnis ini bukan hanya bisa memproduksi, tetapi juga harus bisa menjual. Itu yang saya pelajari dari pengalaman jatuh bangun di awal usaha," tambahnya.

Menjawab Tantangan dengan Kolaborasi

Maura Farm yang dibangun Sumartono terus berkembangkan pesat. Pada akhirnya, pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi melirik lokasinya menjadi Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S).

P4S merupakan lembaga pelatihan pertanian dan perdesaan yang didirikan, dimiliki, dikelola oleh petani secara swadaya, baik perorangan maupun berkelompok. Lembaga tersebut diharapkan secara langsung berperan aktif dalam pembangunan pertanian, khususnya melalui pengembangan sumber daya manusia pertanian, baik dalam bentuk pelatihan/ permagangan bagi petani dan masyarakat di wilayahnya.

Sumartono bercerita awal mula Maura Farm menjadi lokasi P4S karena banyaknya kunjungan edukasi dari anak-anak TK hingga ibu-ibu rumah tangga. Melihat aktifitas tersebut, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi kemudian mendaftarkan Maura Farm sebagai P4S dengan status kelas madya. Sebagai bagian dari dukungan, Maura Farm menerima hibah peralatan edukasi seperti laptop dan proyektor dari BBPP Lembang.

Saat ini, Maura Farm menjadi satu-satunya P4S Hidroponik di Kota Bekasi dan sering dikunjungi masyarakat serta mahasiswa dari berbagai universitas untuk magang dan belajar hidroponik secara langsung. "Saya ingin berbagi ilmu kepada siapa saja yang ingin belajar. Hidroponik ini tidak hanya sekadar bertani, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang besar," ujarnya.

Meski bisnisnya terus berkembang, Sumartono mengakui ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Dalam mengembangkan bisnis pertanian di kota besar menurutnya, tantangan terbesar adalah keterbatasan lahan.

Untuk memenuhi tingginya permintaan, ia harus mencari solusi. Maura Farm pun bekerja sama dengan 11 mitra tani di sekitar Bekasi. Dengan sistem ini, Sumartono dapat memenuhi kebutuhan pelanggan secara lebih efisien. "Permintaan sayur lebih tinggi dari yang bisa saya produksi. Karena itu, saya berkolaborasi dengan petani lain agar tetap bisa memenuhi



kebutuhan pasar," katanya.

Selain itu, Maura Farm juga menghadapi tantangan dalam mengedukasi masyarakat tentang keunggulan sayuran hidroponik. Saat ini menurutnya, banyak yang belum paham bahwa sayuran hidroponik lebih sehat karena bebas pestisida. “Ini yang terus kami sosialisasikan agar lebih banyak orang tertarik mengonsumsi dan membudidayakan sayuran hidroponik," jelasnya.

Sumartono berharap Maura Farm bisa terus berkembang, berkolaborasi dengan berbagai pihak, dan semakin banyak masyarakat yang tertarik berkebun hidroponik. "Saya ingin lebih banyak orang mengenal hidroponik dan bisa menanam sendiri. Saya juga berharap dapat terus bersinergi dengan siapa pun untuk mengembangkan pertanian modern yang berkelanjutan," tutupnya dengan optimisme. **Herman/Yul**

Kementan Bergerak Cepat **Kawal Swasembada Pangan di Sukabumi**



Kementerian Pertanian terus menggencarkan kegiatan swasembada pangan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Diantaranya dengan mengawal langsung jalannya pertanaman padi di semua kecamatan Sukabumi.

Seperti diketahui, Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman meminta semua jajaran kerjanya untuk bergerak cepat melakukan panen dan tanam untuk meningkatkan produksi beras di seluruh Indonesia.

"Semua harus bergerak, tidak boleh berpangku tangan demi terwujudnya swasembada sesuai perintah Bapak Presiden Prabowo agar bisa tercapai dalam waktu dekat," kata Mentan.

Mengenai hal ini, Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang juga Penanggungjawab LTT Terintegrasi di Kabupaten Sukabumi, Leli Nuryati mengatakan, bahwa pergerakan panen dan tanam di Sukabumi sudah berjalan optimal. Apalagi pemerintah terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama dengan jajaran pemerintah daerah, TNI dan juga para petani.

"Minggu ini kami menurunkan tim dibeberapa kecamatan untuk memonitoring LTT dapat terus ditingkatkan, mengingat masih ada hujan untuk mengairi penanaman padi," ujarnya.

Leli menambahkan, kegiatan monitoring kegiatan LTT di Sukabumi dikoordinasikan dengan masing-masing Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang berada di masing-masing kecamatan. "Kami mencatat potensi, kesanggupan tanam dan kendala-kendalanya, sehingga bisa dicarikan jalan keluarnya," ujarnya.

Leli Nuryati menekankan pentingnya periode April sebagai momen kritis untuk mengejar target tanam nasional. Bahkan tim dari pusat telah dibagi ke seluruh wilayah kerja di Sukabumi untuk percepatan monitoring langsung di lapangan. "Kita turun habis-habisan, semua wilayah tercover. Ini arahan langsung dari Pak Menteri. Kita kejar target swasembada dengan semangat dan kerja nyata," tegasnya.

Salah satu kecamatan yang dimonitoring yakni Cisaat dengan potensi lahan yang cukup besar. Kecamatan Cisaat mengajukan usulan 2 lokasi khusus untuk optimalisasi lahan (Oplah) non rawa yakni di Desa Gunungjaya dan Desa Babakan. Saat koordinasi dilaksanakan, hadir konsultan dari Universitas Padjajaran yang akan melakukan survei lokasi SID.

Kecamatan lainnya yang dimonitoring adalah Kecamatan Cireunghas, Gegerbitung dan Purabaya. Potensi LTT di tiga kecamatan tersebut masih cukup besar. Bahkan khusus di Kecamatan Purabaya, direncanakan penyusunan buku perencanaan tanam.

"Dalamrapatdibahaspulakendala dalam optimalisasi penanaman di Kecamatan Purabaya," tambahnya. Saat ini di wilayah tersebut, petani membudidayakan padi varietas unggul Hibrida Mapan 05.

Monitoring dan kunjungan lapang dilaksanakan bersama Pusat PVTPP, dengan Direktorat Serealia, Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, Jajaran TNI, Penyuluh Pertanian dan para Kelompok Tani yang langsung bergerak melakukan olah tanam.

"Dengan pergerakan ini kami optimis mampu mencapai swasembada dalam waktu cepat seperti perintah Bapak Presiden dan juga arahan langsung Bapak Menteri Pertanian," jelasnya.

Humas PPVTPP

TANI **SUKSES**

Yazid Bustomi, **Bisa Panen Cuan dari Sawah**

Yazid Bustomi, petani muda asal Indramayu, buktikan bahwa bertani padi bisa mendatangkan cuan besar. Dengan teknologi modern, ia panen untung hingga puluhan juta per hektare setiap musim tanam!

Yazid Bustomi bukan petani biasa. Di tengah hamparan sawah Desa Kongsijaya, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, ia menanam lebih dari sekadar padi, ia menanam mimpi, inovasi, dan cuan. Di usia 34 tahun, Yazid membuktikan bahwa bertani padi tetap bisa menguntungkan, asalkan tahu caranya. Rahasianya? Teknologi dan mekanisasi.

Kisah Yazid tak dimulai dari lumpur sawah, melainkan dari panasnya api las. Sejak 2008, ia menjalankan bengkel kecil yang memproduksi berbagai alat pertanian seperti roda traktor dan implement traktor. Tapi siapa sangka, dari alat yang ia buat sendiri, ia kemudian terjun langsung ke dunia pertanian.

Tahun 2013 menjadi titik baliknya. Ia mulai serius mengelola lima hektare lahan sawah. Berbekal ilmu, pengalaman, dan rasa penasaran, Yazid memilih jalur berbeda dari kebanyakan petani di sekitarnya, ia memanfaatkan alat mesin pertanian (alsintan) untuk mengolah tanah, menanam, hingga memanen. Salah satu andalannya adalah mesin transplanter, mesin penanam bibit padi otomatis.



Satu mesin transplanter bisa menanam padi di lahan setengah hektare hanya dalam sehari. Bibit tinggal ditaruh di baki khusus, lalu mesin bekerja rapi, cepat, dan presisi. Tanpa ribut, tanpa lelah. Pekerjaan yang biasanya melibatkan belasan orang selama berhari-hari, kini cukup satu orang dan satu mesin.

Begitu juga saat olah tanah. Dengan traktor roda empat, biaya cukup Rp600 ribu sampai Rp 1 juta per hektare, dibandingkan olah tanah manual yang butuh Rp 5,6 juta dan waktu tiga hari. Hemat tenaga, hemat biaya, dan pastinya hemat waktu.

Produktivitas lahan Yazid pun tak main-main: rata-rata 8 ton gabah kering panen (GKP) per hektare. Setelah dikeringkan, hasil gabah kering giling (GKG) mencapai 4–4,8 ton per hektare. Mayoritas ia jual ke tengkulak, menghasilkan omzet Rp25–36 juta per hektare per musim.

Setelah dipotong biaya produksi sekitar Rp15–25 juta per hektare, ia bisa mengantongi laba bersih Rp10 juta. Dengan dua musim tanam per tahun dan lima hektare lahan, tak sulit menebak seberapa besar pundi-pundi rupiah yang masuk ke kantong Yazid.

Meski modern, Yazid tak meninggalkan akar tradisi. Di desanya, sistem ceblokan yaitu kerja tim dari tanam hingga panen, masih berlangsung. Bedanya, sekarang tugas menanam digantikan oleh mesin. Tim hanya perlu menyiapkan bibit dalam baki.

Namun tantangan tetap ada. Saat panen, tak jarang anggota tim lebih memilih mengerjakan sawah lain lebih dulu. Tapi Yazid tak khawatir. Mesin panen yang ia gunakan bisa menyelesaikan satu hektare dalam sehari. Efisiensi jadi senjata utama.

Kekaguman Yazid pada kemajuan pertanian di Vietnam dan Thailand menjadi pemicu semangat. Ia percaya, Indonesia bisa sejajar jika petani mau berubah. Maka, lewat aksinya, ia mengajak petani lain untuk berani mencoba teknologi.

"Petani itu sebenarnya mudah berubah, asal ada yang memberi contoh dan membimbing," ujarnya.

Nattasya/Gsh

Optimalisasi Pekarangan, Untuk Ketahanan Pangan

Oleh : **Warsana, SP.M.Si.,MP.**
Penyuluh Pertanian Ahli Utama BPSIP Jawa Tengah

Optimalisasi pekarangan sebagai penopang ketahanan pangan semakin populer, baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan. Meskipun terbatas, lahan di sekitar rumah dapat menjadi sumber pangan penting bagi keluarga, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasar. Strategi ini sangat relevan dalam menciptakan ketahanan pangan yang mandiri dan berkelanjutan.

1. Pemanfaatan Lahan Secara Efisien

Pekarangan dapat dimanfaatkan untuk menanam sayuran seperti bayam, kangkung, sawi, cabai, tomat, dan selada; buah-buahan seperti pepaya, pisang, dan jeruk; tanaman obat keluarga (TOGA) seperti jahe, kunyit, dan daun salam; serta rempah seperti bawang merah dan putih. Keanekaragaman tanaman ini membantu mencukupi gizi keluarga sekaligus memperkuat ketahanan pangan rumah tangga.

2. Teknik Pertanian Vertikal dan Hidroponik

Bagi masyarakat perkotaan yang memiliki lahan terbatas, teknik vertikal dan hidroponik menjadi solusi. Vertikultur memanfaatkan ruang secara vertikal, sedangkan hidroponik memungkinkan tanaman tumbuh tanpa tanah, cukup dengan air bernutrisi. Keduanya efisien dan cocok untuk diterapkan di balkon atau atap rumah.

3. Pengolahan Kompos Mandiri

Membuat kompos dari sampah organik rumah tangga dapat menyuburkan tanah pekarangan sekaligus mengurangi limbah. Kompos meningkatkan kualitas tanah, mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia, serta membantu tanah menyimpan air lebih baik, terutama saat musim kemarau.

4. Penerapan Polikultur

Polikultur adalah sistem tanam campuran dalam satu lahan yang memberikan berbagai keuntungan, seperti meminimalisir risiko gagal panen akibat hama, memperkaya keberagaman pangan, dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan. Contohnya, menanam jahe bersama bayam atau terong.

5. Pemeliharaan Ternak Kecil

Pekarangan juga dapat dimanfaatkan untuk beternak ayam, bebek, kelinci, atau ikan. Selain menjadi sumber protein, ternak juga menghasilkan pupuk kandang. Misalnya, ayam tidak hanya menghasilkan telur, tetapi juga membantu mengendalikan hama.

6. Pemberdayaan Komunitas dan Koperasi Pekarangan

Ketahanan pangan bisa diperkuat melalui pemberdayaan komunitas. Warga dapat berbagi ilmu, hasil panen, atau membentuk koperasi pekarangan sebagai sarana pemasaran produk secara kolektif.

7. Diversifikasi Produk Pangan

Dengan menanam berbagai jenis tanaman, keluarga memperoleh asupan gizi yang lebih lengkap serta lebih tangguh terhadap fluktuasi harga pangan. Diversifikasi juga membantu meminimalisir risiko gagal panen.

8. Pendidikan dan Penyuluhan

Peningkatan pengetahuan masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, melalui pelatihan pengelolaan pekarangan, teknik bercocok tanam, hingga cara mengolah hasil panen sangat penting untuk menciptakan kemandirian pangan.

9. Pembangunan Infrastruktur Pendukung

Peran pemerintah dan organisasi lokal penting dalam menyediakan benih berkualitas, alat tani sederhana, sistem irigasi mini, serta akses pembelajaran digital untuk mendukung pertanian pekarangan.

Optimalisasi pekarangan merupakan langkah strategis dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan ruang kecil di sekitar rumah, masyarakat dapat memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesadaran akan keberagaman pangan, serta mendukung pertanian ramah lingkungan. Pekarangan bukan sekadar lahan kosong, tetapi ruang produktif untuk menciptakan kemandirian pangan keluarga.

Heboh Tarif, Waspada Pangan

Kolom



Oleh: **Memed Gunawan**

Tarif impor yang ditetapkan presiden Trump mengguncang dunia. Imbasnya diprediksi akan berpengaruh pada rantai pasok, harga barang, ekspor hingga investasi. Penetapan tarif impor yang dianggap semena-mena ini memang kelihatan seperti masih adatarikulurmengingatdampaknya terhadap perekonomian AS sendiri. Demo masyarakat AS terjadi di mana-mana dan negara-negara di dunia mencoba bernegosiasi melalui diplomasi walaupun ada yang berani melakukan retaliasi.

Apa dampaknya terhadap perekonomian Indonesia khususnya pertanian? Dan apa saja upaya yang harus dilakukan?

Secara umum pakar ekonomi memperkirakan dampak itu pasti ada dan signifikan tetapi dibanding negara yang sangat tergantung pada perdagangan dunia, dampak terhadap Indonesia masih dianggap lebih moderat. Nilai ekspor Indonesia tercatat sekitar 25 persen dari Produk Domestik Bruto, bandingkan dengan Singapura yang angkanya mencapai sekitar 85 persen.

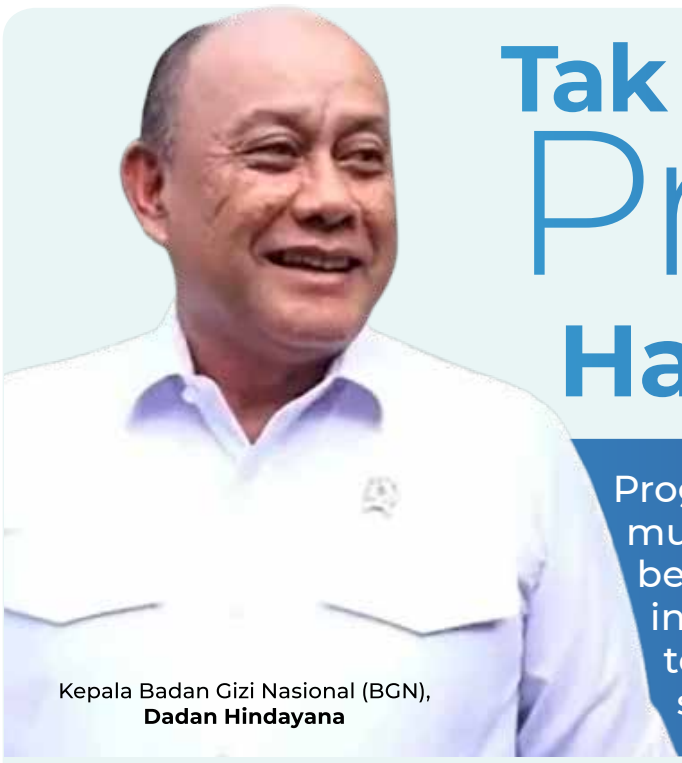
Dalam beberapa kali resesi/guncangan perekonomian dunia, pertanian Indonesia dapat dikatakan survive dan mampu bertahan dengan baik. Pertanian Indonesia termasuk yang tahan banting dan bahkan jadi penyelamat pada saat terjadi krisis ekonomi. Komoditas ekspor pertanian seperti karet, kopi, kakao, sawit, teh dan rempah-rempah yang merupakan produk eksotik dan tetap dibutuhkan oleh negara-negara importir, pasti juga terkena imbas. Para pengamat masih optimis, ekspor Indonesia hanya menurun sekitar 0,5 persen. Meningkatkan efisiensi dan deregulasi untuk mengurangi biaya transaksi dianggap efektif untuk mengatasi peningkatan tarif impor tersebut. Mencari pasar baru juga menjadi opsi yang dilakukan oleh pemerintah.

Selain mempertahankan kapasitas ekspor komoditas tradisional, yang tidak boleh diabaikan adalah komoditas pangan yang sensitif memicu kerawanan sosial. Produk pangan tidak boleh lepas dari perhatian pemerintah dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional. Upaya-upaya khusus untuk meningkat produktivitas, efisiensi, kualitas dan distribusi tetap dilakukan dengan menjamin ketersediaan sarana produksi, kredit dan fasilitasi infrastruktur pra maupun pasca panen untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Secara nasional, selain melalui ekstensifikasi, produktivitas masih mempunyai ruang untuk ditingkatkan dengan dukungan sarana produksi yang lebih baik.

Oleh karena itu perlu diidentifikasi dengan lebih cermat aspek yang bisa menjadi pengungkit efisiensi. Deregulasi dan kemudahan bagi petani untuk meningkatkan produksi sangat penting. Penyaluran KUT yang besar untuk alsintan, penyaluran pupuk, benih, modal kerja memerlukan evaluasi yang cermat. Penelitian yang detil tentang kondisi pertanian di tingkat petani memberikan informasi akurat kondisi yang dialami petani dalam melaksanakan kegiatan pertanian. Kesulitan memperoleh pupuk dan kredit masih menjadi keluhan petani. Informasi detil bersumber hasil penelitian berdasarkan data primer di sektor pertanian dapat mengungkap kondisi di lapangan yang dihadapi petani.

Penetapan tarif yang terkesan tiba-tiba memang mengguncang dunia, tetapi besaran tarif masih terus berubah karena negosiasi dan desakan masyarakat AS sendiri. Kita memang tidak bisa hidup sendiri. Kondisi yang berbeda di masing-masing negara, membuat semua saling tergantung.■

Tak Sekadar Memberi Makan, Program MBG Harapan Baru Masyarakat



Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), **Dadan Hindayana**

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang pemerintah canangkan mulai menunjukkan hasil positif di berbagai lini. Tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, program ini juga memberi efek besar terhadap ekonomi rakyat kecil, termasuk dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem yang selama ini menjadi tantangan utama di berbagai daerah.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menyampaikan, salah satu keberhasilan yang paling mencolok dari program ini adalah meningkatnya pendapatan kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak produktif secara ekonomi.

Ia mencontohkan, banyak ibu rumah tangga berusia 40 hingga 45 tahun yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan, kini memperoleh penghasilan tambahan setelah bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sejauh ini, menurutnya, sudah ada sekitar 50 ribu orang yang bekerja melalui jalur ini.

Dadan mengungkapkan, keberadaan SPPG di berbagai wilayah juga membuka peluang besar bagi terciptanya lapangan pekerjaan baru. Badan Gizi Nasional menargetkan hingga akhir tahun 2025 akan terdapat 30.000 SPPG di seluruh Indonesia. Jika setiap SPPG membutuhkan sekitar 50 tenaga kerja, maka secara langsung program ini berpotensi membuka hingga 1,5 juta lapangan pekerjaan di sektor penyediaan makanan bergizi.

Namun lebih dari sekadar lapangan kerja, program ini juga mendorong lahirnya wirausaha-wirausaha baru. Hitungannya, setiap SPPG bisa menciptakan minimal 15 pengusaha baru, mulai dari pemasok bahan pokok seperti telur, beras, dan sayur, hingga pengelola limbah seperti minyak jelantah.

“Dalam proyek percontohan di Warungkiara, Sukabumi, seluruh mitra yang terlibat sebagai pemasok adalah pengusaha baru yang tumbuh dari semangat kolaborasi,” katanya.

Program ini semakin menarik karena faktanya seluruh infrastruktur SPPG tidak dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebaliknya, semua dibiayai lewat skema kemitraan bersama UMKM, restoran kecil, dan penyedia katering yang sebelumnya nyaris gulung tikar karena kekurangan pelanggan.

Dengan demikian, kerja sama ini memberi napas baru bagi pelaku usaha kecil. Bahkan banyak restoran yang sebelumnya sepi, kini kembali bergeliat karena mendapatkan pelanggan tetap dari program MBG, bahkan mencapai 3.000 orang per hari.

Besarnya kebutuhan pangan yang muncul dari program MBG secara tidak langsung juga mendorong penyerapan produksi pangan nasional. Dadan menjelaskan, jika





82,9 juta penerima program dilayani, maka kebutuhan telur saja bisa mencapai 5.000 ton dalam satu kali sajian. ”Kalau frekuensinya dua kali seminggu, dibutuhkan 10 ribu ton telur setiap pekan, atau sekitar 400 ribu ton per tahun,” ujarnya.

Padahal, lanjut Dadan, surplus produksi telur nasional saat ini hanya mencapai 200 ribu ton. Artinya, permintaan dari program MBG mampu menyerap seluruh kelebihan produksi, bahkan mendorong peningkatan kapasitas di sektor peternakan.

Selain telur, kebutuhan lain yang muncul di setiap SPPG adalah ayam, sayuran, buah-buahan, serta susu. Jumlahnya setiap hari mencapai ratusan kilogram. Jika dijalankan secara nasional, maka program ini diperkirakan akan mendorong kebutuhan hingga 1,5 juta ekor sapi perah tambahan demi mencukupi konsumsi susu harian.

Gandeng Berbagai Pihak

Untuk memperkuat struktur pelaksanaannya, BGN juga menggandeng berbagai pihak. Misalnya, TNI telah berkomitmen membangun 2.000 unit SPPG, disusul Polri 1.000 unit, BIN 1.000 unit, Nahdlatul Ulama 1.000 unit, dan Muhammadiyah sebanyak 500 unit.

”Masyarakat pun dilibatkan secara aktif, termasuk dengan memanfaatkan rumah kosong untuk diubah menjadi dapur komunitas berbasis gizi,” tambahnya.

BGN juga menyiapkan sumber daya manusia berkualitas untuk mendukung keberhasilan program. Sebanyak 30.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia sedang disiapkan oleh Universitas Pertahanan (Unhan), dengan masa studi antara tiga hingga empat bulan.

Dua bulan pertama difokuskan pada pelatihan komponen cadangan (Komcad). Sisanya pada pendidikan teknis seperti keamanan pangan, pengolahan makanan, dan budidaya pertanian. ”Saat ini sudah ada dua angkatan yang lulus dan ditugaskan di lapangan, menjangkau seluruh provinsi di Indonesia,” tuturnya.

Dadan meyakini, keberadaan para sarjana pendamping ini akan menjamin kualitas pelaksanaan di setiap SPPG. ”Mereka akan menjadi pemimpin di tiap satuan pelayanan pemenuhan gizi, memastikan program berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dalam pandangan Dadan, MBG tidak hanya menjadi solusi gizi jangka pendek, tetapi juga pemicu lahirnya perubahan struktural di masyarakat. Dengan meningkatnya permintaan pangan dan penguatan sektor pertanian serta peternakan, ia yakin tidak akan ada lagi pekarangan rumah yang dibiarkan kosong, bahkan di kota-kota besar.

Konsep pertanian praktis atau practical farming di lingkungan urban akan menjadi bagian dari gaya hidup baru masyarakat Indonesia. Selanjutnya, melalui penguatan koperasi lokal sebagai agregator, pola tanam petani juga akan diarahkan sesuai kebutuhan harian SPPG.

”Ini akan menciptakan ekosistem pangan yang lebih teratur, terukur, dan produktif. Program Makan Bergizi Gratis bukan hanya memberi makan, tetapi juga memberi harapan,” ujarnya.**Humas BGN**

Melirik Padi Gogo, Alternatif Pengungkit Produksi Pangan



Optimalisasi lahan kini menjadi salah satu strategi pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian untuk memacu produksi padi. Diantaranya menyasar lahan kering, baik lahan perkebunan dan kehutanan untuk pengembangan padi gogo. Sejauh mana peluang mengungkit produksi padi nasional?

Seperti diketahui Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni beberapa waktu lalu menggelar penanaman padi gogo di lahan kawasan hutan secara serentak di 17 provinsi di seluruh Indonesia. Kegiatan berlangsung di areal Hutan Kemasyarakatan Kelompok Tani Hutan (KTH) KTH Tani Jaya 4, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dengan luas penanaman sekitar 5 ha.

Mentan Amran mengatakan, pemanfaatan lahan kering melalui sistem tumpang sari dengan tanaman pangan memiliki potensi luas mencapai 500 ribu ha. Dari luasan itu sekitar 389 ribu ha berada di kawasan perhutanan sosial dan lahan kehutanan lainnya.

Selain optimalisasi lahan di kawasan kehutanan, potensi lahan yang bisa digarap yakni lahan perkebunan sawit dengan sistem tumpang sisip (tusip). Misalnya, kegiatan yang berlansung di Desa Nanggala, Kecamatan Cikeusik.

Bantu Pekebun

Aryadi (37), pekebun dari Kelompok Tani (Poktan) Neglasari, mengungkapkan bahwa luas lahan yang ditanami padi gogo oleh kelompoknya mencapai 25 ha. Selain kelompoknya, terdapat tiga kelompok tani lain di desa yang sama, dengan total luas lahan budidaya padi mencapai 100 ha. Sedangkan total perkebunan sawit mencapai 200 ha.

"Musim tanam padi gogo biasanya dimulai pada awal musim hujan, sekitar November hingga Desember. Alhamdulillah, padi gogo yang petani tanam akan panen, saya perkirakan hasilnya cukup baik berkisar 2-3,5 ton/ha," tuturnya.

Program penanaman padi gogo Aryadi mengakui, sangat membantu pekebun. Sebelum sawit menghasilkan, padi gogo menjadi sumber pendapatan alternatif yang dapat meningkatkan kesejahteraan pekebun. "Manfaatnya sangat besar, tidak hanya untuk tambahan penghasilan tetapi juga untuk mendukung swasembada pangan," katanya.

Direktorat Jenderal Perkebunan berupaya menggencarkan penanaman padi gogo di lahan kering dan perkebunan. Padi gogo memiliki keunggulan dapat tumbuh di lahan non-irigasi, berbeda dengan jenis padi lain yang membutuhkan lahan basah. Dengan karakteristik tersebut, padi gogo diharapkan menjadi solusi ketahanan pangan di masa mendatang.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan, Heru Tri Widarto mengatakan, penanaman padi gogo di sela kebun sawit merupakan bagian dari program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Integrasi ini tidak hanya bertujuan meremajakan sawit, tetapi juga sebagai strategi menciptakan ketahanan pangan.

"Program PSR ke depan juga akan mencakup bantuan benih untuk tumpang sisip padi gogo. Dalam skema ini, pekebun akan menerima bantuan berupa penumbangan dan pembersihan lahan, herbisida, benih, hingga pupuk," ujar Heru.

Integrasi padi gogo dalam kebun sawit PSR menurutnya, mencerminkan model pertanian yang berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah dan pekebun ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi juga memperkuat ketahanan pangan.

"Kita berharap dengan adanya program ini lahan perkebunan sawit tetap produktif sebelum sawit siap dipanen. Kami ingin memastikan bahwa pekebun memiliki alternatif sumber pendapatan yang berkelanjutan," katanya.

Dengan model integrasi ini, menurut Heru, padi gogo bukan hanya sekadar komoditas tambahan, tapi juga menjadi elemen penting dalam sistem pertanian nasional. Keberhasilan pekebun di Pandeglang bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan perkebunan untuk ketahanan pangan yang berkelanjutan. **Yul**

Mengenal Varietas Padi Gogo

Inpago 4

Varietas Inpago 4 memiliki potensi hasil gabah kering giling sebesar 6,1 ton/ha. Rata-rata hasil varietas ini di lahan kering sebesar 4,1 ton/ha dengan umur panen 124 hari. Varietas ini memiliki tekstur nasi pulen. Inpago 4 memiliki ketahanan yang baik terhadap beberapa ras penyakit blas yang merupakan penyakit utama di lahan kering. Selain itu varietas ini juga toleran terhadap keracunan aluminium sehingga cocok ditanam di lahan kering subur maupun di lahan kering masam (podsolik merah kuning).

Inpago 5

Varietas ini mampu menghasilkan gabah kering giling sampai 6,2 ton/ha, dengan rata-rata hasil 4,0 ton/ha. Varietas ini dapat dipanen setelah berumur 118 hari. Dengan kadar amilosa dalam beras sebesar 18%, tekstur nasi varietas ini tergolong sangat pulen. Inpago 5 tahan terhadap beberapa ras blas. Varietas ini juga toleran terhadap kekeringan dan agak toleran terhadap keracunan aluminium, sehingga sangat sesuai ditanam baik di lahan kering subur maupun lahan kering podsolik merah kuning.

Inpago 7 (Beras Merah)

Inpago 7 merupakan satu-satunya varietas unggul padi gogo beras merah. Varietas yang dilepas tahun 2011 ini memiliki rata-rata hasil 4,6 ton/ha, dengan potensi hasil di lahan kering mencapai 7,4 ton/ha. Inpago 7 dapat dipanen setelah berumur 111 hari. Varietas ini memiliki kadar amilosa 20,3% dengan tekstur nasi pulen. Seperti halnya varietas Inpago yang lain, varietas ini tahan terhadap beberapa ras penyakit blas. Namun varietas ini rentan terhadap keracunan aluminium sehingga hanya dianjurkan di tanam di lahan kering yang tidak memiliki masalah keracunan aluminium.

Inpago 8

Varietas Inpago 8 dilepas tahun 2011 dan merupakan hasil persilangan antara varietas padi gogo Cirata dengan galur TB177. Inpago 8 memiliki potensi hasil yang cukup tinggi yakni mencapai 8,1 ton/ha, dengan rata-rata hasil 5,2 ton/ha. Umur panen varietas ini adalah 119 hari. Inpago 8 memiliki rasa nasi yang enak dengan tekstur nasi pulen. Keunggulan lain dari varietas ini adalah tahan terhadap beberapa ras penyakit blas, toleran terhadap kekeringan, dan agak toleran terhadap keracunan aluminium. Varietas ini baik ditanam di lahan kering dataran rendah sampai dataran menengah, baik lahan kering subur maupun lahan kering masam.

Inpago 9

Varietas Inpago 9 memiliki rata-rata hasil 5,2 ton/ha dan dapat dipanen pada umur 109 hari. Varietas yang dilepas pada tahun 2012 ini dicirikan dengan warna gabahnya yang berwarna kuning bergaris coklat dengan bentuk gabah bulat besar. Tekstur nasi Inpago 9 tergolong sedang dengan kadar amilosa sekitar 22%. Selain memiliki ketahanan yang baik terhadap penyakit blas, varietas ini juga agak tahan terhadap hama wereng coklat biotipe 1 dan penyakit hawar daun bakteri patotipe III.

Inpago 10

Varietas Inpago 10 merupakan varietas unggul padi gogo yang dilepas Badan Litbang Pertanian (kini Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian) pada tahun 2014. Varietas ini dilepas setelah melalui pengujian di berbagai lokasi lahan kering bersama

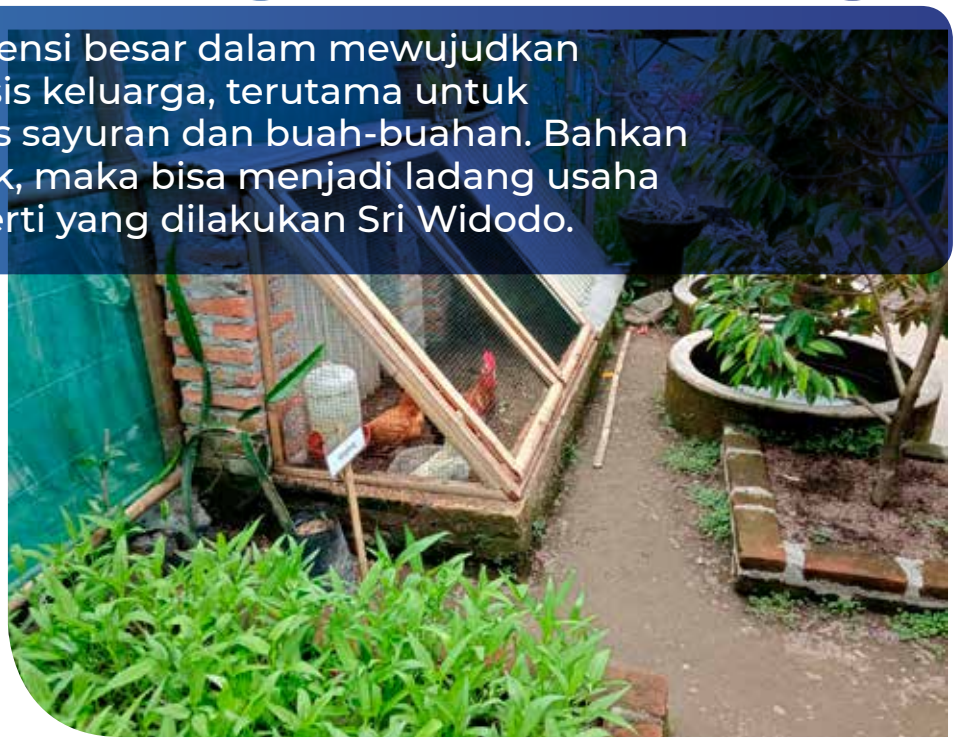


dengan galur-galur padi gogo unggulan dari lembaga penelitian lain seperti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Rata-rata hasil varietas Inpago 10 di lahan kering sekitar 3,9 ton/ha dengan potensi hasil mencapai 7,3 ton/ha. Varietas ini dapat dipanen pada umur 115 hari dan memiliki tekstur nasi yang sedang. Selain tahan terhadap penyakit blas, varietas ini juga agak toleran terhadap kekeringan dan keracunan aluminium.

Yoso Farm, Inspirasi Gaya Hidup Mandiri Pangan Keluarga



Lahan pekarangan memiliki potensi besar dalam mewujudkan ketahanan pangan berbasis keluarga, terutama untuk menghasilkan komoditas sayuran dan buah-buahan. Bahkan jika dikelola dengan baik, maka bisa menjadi ladang usaha yang menjanjikan. Seperti yang dilakukan Sri Widodo.



Di sebuah sudut perkampungan di Dukuh Karangkulon, Desa Bero, Kecamatan Trucuk, Klaten, sebuah konsep hidup mandiri berkembang pesat**.** Sri Widodo dan istrinya, Nurul Fitri Hidayati, telah menerapkan gaya hidup *homestead* atau swasembada pangan yang kini menginspirasi banyak orang.

Siang itu, saat Tabloid Sinar Tani berkunjung ke Yoso Farm, Sri Widodo baru saja menyelesaikan sesi pertama pelatihan tentang pemanfaatan pekarangan untuk pangan lestari. Enam peserta dari berbagai daerah, termasuk Piyungan, Gunung Kidul, dan Mungkid, Magelang, tampak antusias menyimak materi yang disampaikan.

Setiap hari, Yoso Farm kedatangan tamu, baik perorangan maupun kelompok yang ingin belajar dan memahami konsep *homesteading*. Sekolah, perguruan tinggi, organisasi sosial, hingga kelompok PKK menjadikan tempat ini sebagai destinasi edukasi tentang kemandirian pangan dan pertanian berkelanjutan.

Pusat Pembelajaran

Sejak 2017, Sri Widodo dan Nurul Fitri mulai mengembangkan kebun mereka dengan sistem terpadu dan berkelanjutan. Awalnya, niat mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga sendiri. Namun, setelah aktif membagikan pengalaman melalui media sosial, banyak orang tertarik untuk belajar langsung. Untuk memudahkan identifikasi, mereka memberi nama kegiatan ini *Yoso Farm*.

Meskipun luas pekarangan mereka hanya sekitar 500 meter persegi, mereka mampu memanfaatkannya secara optimal. Sekitar 200 meter persegi digunakan untuk rumah, sementara sisanya menjadi lahan produktif untuk berkebun dan beternak.

Di halaman depan, beragam tanaman buah dalam pot (*tabulampot*) tumbuh subur, mulai dari jambu, nanas, hingga durian. Di sisi kiri pekarangan, berbagai jenis sayuran tertata rapi, termasuk sawah mini sepanjang 10 meter yang digunakan untuk menanam padi organik. "Kami mencoba menanam padi secara full organik, baik dari segi pupuk maupun pestisidanya. Sampai saat ini hasilnya cukup memuaskan," ujar Sri Widodo.

Salah satu inovasi yang mereka kembangkan adalah konsep "1 orang 1 ekor ayam" untuk memenuhi kebutuhan protein hewani. Mereka memelihara empat ekor ayam KUB (Kampung Unggul Balitbangtan), terdiri dari tiga betina dan satu jantan, di dalam kandang ayam inovatif yang mereka beri nama *Kastari* (*Kandang Ayam Lestari*).

Kandang ini dirancang agar praktis dan bebas bau, karena kotoran ayam bercampur dengan limbah organik serta bioaktivator yang secara alami mengurai bau dan mempercepat proses kompos.

Selain ayam, mereka juga beternak magot yang digunakan sebagai pakan alami bagi ayam dan lele yang dipelihara di dua kolam bundar dekat kandang. Hasil telur dari ayam-ayam ini cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan sering kali masih ada sisa untuk dijual.

Seperti diketahui pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian mempunyai program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B). Program ini bertujuan untuk peningkatan gizi keluarga dan pendapatan rumah tangga, serta mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Target kegiatan P2B tahun 2025 yaitu optimalisasi pemanfaatan pekarangan skala rumah tangga di 13.500 kelompok di 2.628 desa yang tersebar di 623 kecamatan dan 434 kabupaten.

Bagi Sri Widodo dan Nurul Fitri, konsep *homesteading* bukan sekadar berkebun atau beternak, tetapi lebih kepada filosofi hidup mandiri. "Ketika kami memiliki kebutuhan, hal pertama yang kami pikirkan bukan membeli, melainkan bagaimana bisa memproduksinya sendiri," kata Sri Widodo.

Mereka juga mengolah limbah dedaunan menjadi pupuk organik dan pestisida hayati, memastikan bahwa seluruh siklus pertanian di Yoso Farm berjalan secara alami dan berkelanjutan. Dengan tekad yang kuat dan ilmu yang terus mereka kembangkan, pasangan ini membuktikan bahwa kemandirian pangan bukan sekadar mimpi.

Yoso Farm telah menjadi bukti nyata bahwa rumah pangan lestari dapat diwujudkan di pekarangan sendiri, menginspirasi banyak orang untuk mengikuti jejak mereka.

Djoko W/Herman





Komersialisasi E-PAPER Sinartani

Tabloid Sinartani | Tabloid sinartani.com | SINTA TV

E-paper Sinartani sudah berjalan selama 2 tahun dan memberikan informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan Sinartani versi cetak. E-paper Sinartani terbit tiap minggu, 48 kali setahun, terdiri dari 20-24 halaman sekali terbit. Informasinya mencakup issue-issue yang lebih melebar, selain pertanian juga mencakup informasi umum dan humaniora.

Sampai saat ini e-Paper Sinartani masih didistribusikan secara gratis ke semua penyuluh. Kini, waktunya E-Paper yang sudah dikenal oleh penyuluh dan petani itu mulai dijual secara komersil dengan harga yang teramat murah, yaitu Rp 1.500/edisi atau Rp 72.000/tahun.

Mudah-mudahan upaya ini merupakan sinergi yang baik antara pembaca dengan penerbit Sinartani yang tidak henti-hentinya berupaya meningkatkan kualitas Sinartani agar lebih bermanfaat dan sekaligus memberi bahan bacaan yang baik bagi pembacanya.

Para pembaca yang ingin berlangganan dipersilahkan mengirimkan nama dan nomor HP-nya, melalui WhatsApp ke Sdr Wawan (081216304232) serta mentransfer biaya tahunan sebesar Rp 72.000 ke Rekening Sinartani: Bank Mandiri Cab. Ragunan No. 127.0096.016.413



BERLANGGANAN
E-paper Tabloid Sinartani

Hanya dengan

Rp. 72.000 / Tahun

HUBUNGI :
0813 1757 5066
Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut

KAMI MENJANGKAU LEBIH LUAS

www.tabloidsinartani.com | tabloidsinartani.com | tabloidsinartani.com | @SinarTaniST | tabloidsinartani | SINTA TV

Kelapa Tanaman Sosial Setelah Padi



Bagi masyarakat Indonesia, bertani padi menjadi bagian budaya. Terlihat, meski banyak kendala dalam usaha tani padi, petani tetap bertanam padi. Selain padi, ternyata tanaman kelapa juga menjadi bagian kehidupan sosial bagi petani, terutama masyarakat yang hidup di pedesaan.

Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University, Prof Sudrajat mengatakan, kelapa memiliki peran penting sebagai tanaman sosial setelah padi di Indonesia. Menurutnya, kelapa bukan hanya komoditas pertanian, tetapi juga bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

Berdasarkan data Food and Agriculture Organization (FAO), Indonesia merupakan produsen kelapa terbesar di dunia. Produksinya mencapai 17 juta ton pada tahun 2022. “Hal ini menunjukkan bahwa kelapa memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan optimal,” ucapnya dalam salah satu podcast di kanal YouTube IPB TV.

Prof Sudrajat mengungkapkan, kelapa memiliki tiga keistimewaan utama. Pertama, dari segi kegunaan, hampir seluruh bagian kelapa dapat dimanfaatkan. Batangnya untuk furnitur dan ekspor, pelepahnya untuk kerajinan, daunnya untuk ketupat, serta buahnya untuk berbagai keperluan, seperti kopra, minyak, santan, arang aktif, dan bahan makanan. ”Air kelapa juga dikenal memiliki manfaat kesehatan sebagai pengganti cairan tubuh,” ujarnya seperi dikutip dari kanal IPB.ac.id.

Kedua, dari segi budaya, kelapa telah lama digunakan dalam berbagai tradisi dan makanan khas Nusantara. Di Jawa Barat, kelapa digunakan dalam pembuatan sayur lodeh, sedangkan di Sumatera Barat, rendang juga tidak terlepas dari peran kelapa.

Ketiga, daya adaptasi kelapa sangat luas. Kelapa dapat tumbuh di berbagai wilayah Indonesia, dari pantai hingga dataran tinggi, menjadikannya komoditas strategis yang mudah dibudidayakan oleh petani.

Saat ini menurut Prof Sudrajat, lebih dari 95 persen perkebunan kelapa di Indonesia dimiliki oleh rakyat, sehingga jutaan petani bergantung pada komoditas ini. Dengan luas lahan mencapai 3,2 juta ha, sektor kelapa melibatkan sekitar 10-12 juta orang dalam rantai produksi, distribusi, dan pemasaran.

“Sayangnya, industri pengolahan kelapa di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain. Padahal, negara seperti Filipina dan India telah lebih dulu mengembangkan industri kelapa secara terintegrasi untuk meningkatkan nilai tambah produk kelapa,” katanya.



Untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa, Prof Sudrajat menekankan perlunya pembangunan industri pengolahan kelapa secara terintegrasi dari hulu ke hilir di setiap provinsi penghasil kelapa. “Model seperti yang diterapkan di Riau, yang mengolah seluruh bagian kelapa menjadi berbagai produk bernilai tinggi, dapat menjadi contoh bagi daerah lain,” ungkapnya.

Sebagai Guru Besar Departemen Agronomi dan Hortikultura IPB University, Prof Sudrajat berharap pemerintah dapat mengadopsi pendekatan berbasis kawasan dengan mendirikan pabrik pengolahan kelapa di tingkat kecamatan atau kabupaten.

Selain itu, ia mendorong skema kepemilikan saham oleh petani dalam industri pengolahan kelapa agar mereka tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga mendapatkan manfaat lebih dari nilai tambah produk.

Pemerintah diharapkan juga kembali fokus pada program intensifikasi dan peremajaan kelapa, sebagaimana yang dilakukan pada dekade 1990-an hingga awal 2000-an. “Kelapa berpotensi menjadi sumber kesejahteraan bagi jutaan masyarakat Indonesia jika dikelola dengan strategi tepat, sekaligus juga dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen kelapa terbesar di dunia,” ucapnya.

Kelapa Langka

Sementara itu mengenai kelangkaan kelapa yang terjadi di dalam negeri akhir-akhir ini, sehingga membuat harganya mengalami lonjakan signifikan, Prof Amzul Rifin, pakar dari Departemen Agribisnis IPB University, menjelaskan bahwa fenomena ini dipicu peningkatan permintaan ekspor, khususnya minyak kelapa.

Menurut Prof Amzul, meski nilai ekspor minyak kelapa meningkat, kuantitas ekspornya justru mengalami penurunan, yang mencerminkan harga dunia yang semakin tinggi pada tahun 2025. “Kelangkaan yang terjadi lebih disebabkan oleh meningkatnya permintaan luar negeri. Harga dunia yang naik membuat ekspor lebih menguntungkan dibandingkan menjual kelapa di pasar domestik,” ujarnya.

Produksi kelapa Indonesia pada 2024 tercatat sebesar 2,89 juta ton, dengan sebagian besar produksi (98 persen) berasal dari petani rakyat. Selain memenuhi kebutuhan dalam negeri, kelapa Indonesia juga diekspor dalam bentuk bahan baku maupun olahan, terutama minyak kelapa.

Pada tahun 2022, sekitar 67 persen ekspor kelapa Indonesia berupa minyak kelapa, baik setengah jadi maupun mentah. Permintaan luar negeri yang terus meningkat menyebabkan kelapa dalam negeri lebih banyak diolah menjadi minyak kelapa untuk ekspor, yang berujung pada kelangkaan pasokan kelapa di pasar domestik.

Untuk mengatasi masalah ini, Prof Amzul menerangkan, langkah strategis perlu diambil untuk meningkatkan ketahanan pasokan kelapa dan mengurangi fluktuasi harga. “Peningkatan produktivitas dan perluasan area tanam menjadi dua solusi utama untuk meningkatkan produksi kelapa,” katanya.

Namun, ia mengakui, kelapa menghadapi persaingan dengan tanaman lain, terutama kelapa sawit, yang seringkali lebih menguntungkan bagi petani. Untuk menarik minat petani dalam menanam kelapa, Prof Amzul menyarankan peningkatan pendapatan petani, baik dari hasil kelapa maupun dari produk turunannya. Hal ini diharapkan dapat memastikan keberlanjutan produksi kelapa di Indonesia. **Yul**

Menyemai Mimpi, **Fikri Menuai Hasil di Dunia Kopi**

Sejak kecil, Fikri Raihan Hakim sudah menambatkan mimpinya pada dunia pertanian. Baginya, kebahagiaan yang terpancar dari sang ayah dan kakek yang bekerja sebagai petani, menjadi gambaran jelas tentang hidup yang bermakna.



Di usia taman kanak-kanak, ia telah mantap menjawab ingin menjadi petani, dan menuliskan impian itu dalam secarik kertas yang dikubur di tanah bersama saudara-saudaranya. Lima belas tahun kemudian, impian itu menjelma nyata.

Fikri, alumni Departemen Teknik Mesin dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian angkatan 50 IPB University ini dikenal luas sebagai petani milenial sekaligus pelaku industri kopi spesial asal Jawa Barat. Dirinya membangun Java Frinsa Estate, sebuah inisiatif yang tumbuh dari semangat keluarga, visi pertanian berkelanjutan, dan semangat inovasi yang kuat.

Berawal dari bisnis keluarga yang dikenal sebagai eksportir komoditas kentang, Fikri perlahan membawa arah baru dengan membangun bisnis kopi pada 2011. Ia mulai menjual produk kopi *green bean* dengan merek Java Frinsa Coffee. Perlahan, usahanya tersebut menjelma menjadi salah satu produsen kopi spesialti Indonesia yang diperhitungkan di pasar nasional dan internasional.

Kini kopi dari Frinsa Estate telah merambah pasar Australia, Jepang, Amerika Serikat, Norwegia, hingga Afrika Selatan. Tak sekadar ekspor, ia juga membawa cita rasa kopi Indonesia ke ajang internasional. Pada 2016, dua sampel kopi Frinsa masuk 20 besar dalam kompetisi cita rasa kopi di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat, dengan menempati peringkat kedua dan ke-17.

Pengakuan internasional terus mengalir, termasuk dari ajang di Hamburg, Jerman, yang membawanya menjalin kemitraan ekspor jangka panjang dengan pengusaha kopi Norwegia. Keunikan Frinsa Estate tidak hanya terletak pada asal geografis biji kopi, namun juga pada metode pengolahan yang inovatif dan ramah lingkungan.

Proses pasca panen memanfaatkan metode seperti *fully washed, wet-hulled, honey,* dan natural. Beberapa metode eksperimental yang diterapkan antara lain *blue process, anaerobic lactic fermentation*, dan *saccharic fermentation*, yang memperkaya profil rasa dan memperkuat identitas kopi Frinsa di mata penikmat global.

Filosofi bisnis Fikri bertumpu pada prinsip bertumbuh secara bertahap, mengejar kemenangan kecil dan menghindari kerugian besar. Baginya, kunci kesuksesan wirausaha bukan hanya pada produk, tapi penguasaan *soft skill*, terutama kemampuan membangun relasi dengan manusia.

Karena itu, Ia menyarankan agar anak muda memilih bidang usaha yang membutuhkan keahlian khusus dan belum banyak pemainnya. Ruang inovasi pun menjadi sangat penting agar bisa melangkah lebih cepat dari pasar pada umumnya.

Semangatnya merawat warisan keluarga, ketekunannya mengembangkan inovasi, dan keberaniannya menembus pasar dunia, menjadikan Fikri Raihan Hakim sosok inspiratif bagi generasi muda pertanian Indonesia. Ia membuktikan mimpi yang ditanam sejak kecil bisa tumbuh besar dan berbuah manis, sejauh ada kesungguhan untuk terus belajar dan bergerak maju.

Sumber: alumniipbpedia.co.id

Tabloid Sinar Tani
PERTANIAN INDONESIA BARU
SINTA TV

PRICE LIST
BERLANGGANAN



SINAR TANI CETAK
RP. 16.000
Per Edisi
Minimum Pembelian
Rp 64.000/BLN
Rp 768.000/THN

SINAR TANI EPAPER
Rp. 72.000/ Thn

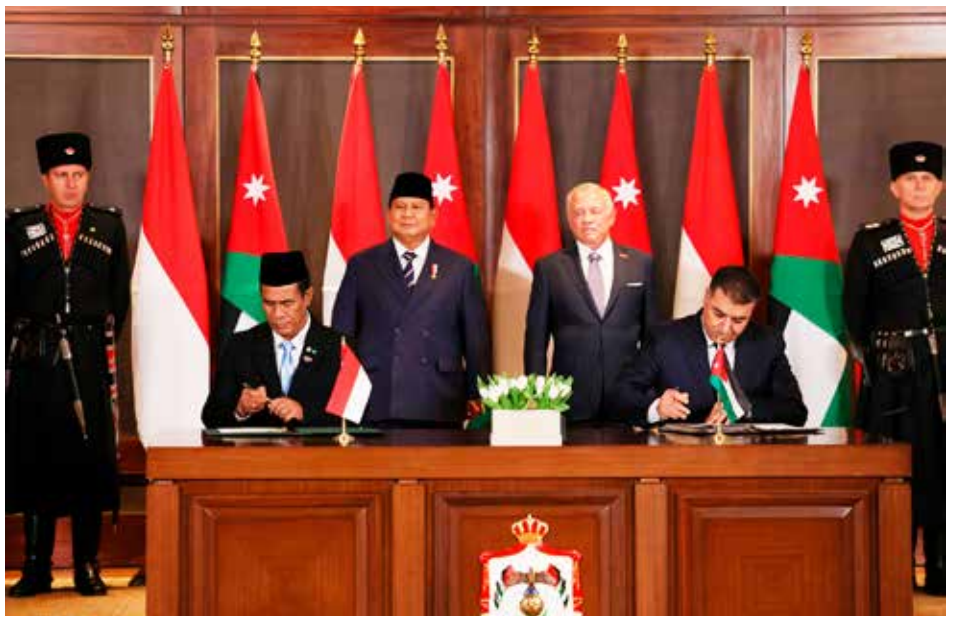
Nama : .....
Alamat : .....
.....
Nomor Whatsapp : .....
Email : .....
Jabatan : .....
No rek : 127.0096.016.587
Bank Mandiri Cabang Ragunan A.n PT. Duta Karya Swasta

CONTACT
081280312466 - Hasan Latuconsina (Koperasi Perhiptani)
081318273349 - Rita (Koperasi Perhiptani)
081216304232 - Wawan (Sinar Tani)
085921280998 - Asrori (Sinar Tani)

sinartani.co.id tabloidsinartani.com @SinarTaniST tabloidsinartani SINTA TV SINTA TV

RI-Yordania
Perkuat Kerjasama Pertanian

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bertolak menuju Amman, Yordania, pada Sabtu pagi (12/4) mendampingi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam rangkaian kunjungan kenegaraan ke sejumlah negara di kawasan Timur Tengah dan Turki. Dalam rombongan tersebut turut serta Menteri Agama Nasaruddin Umar.



Kunjungan ini bertujuan mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan negara-negara mitra strategis, khususnya di bidang perdagangan, investasi, dan pertanian. Indonesia dan Yordania telah menjalin hubungan diplomatik sejak tahun 1950 dan terus memperkuat kerja sama lintas sektor yang saling menguntungkan.

Selama di Yordania, Mentan Amran dijadwalkan menandatangani nota kesepahaman di bidang pertanian dengan pihak Kerajaan Hasyimiyah. Ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi pertukaran informasi dan dokumentasi ilmiah serta teknis; pelaksanaan program pelatihan dan peningkatan kapasitas; kolaborasi program magang dan partisipasi pameran; promosi perdagangan dan investasi pertanian; fasilitasi akses pasar produk-produk pertanian.

Kerja sama ini sangat relevan karena Indonesia dan Yordania memiliki potensi saling melengkapi. Indonesia unggul dalam produksi komoditas tropis seperti kelapa sawit, rempah-rempah, dan karet. Sementara Yordania merupakan salah satu produsen fosfat terbesar di dunia, serta memiliki keunggulan dalam teknologi pertanian lahan kering dan pengelolaan air.

Selain kerja sama teknis, kesamaan karakter sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim membuka peluang besar dalam pengembangan industri halal, termasuk produk pangan berbasis syariah. Momen ini menandai dimulainya babak baru kerja sama bilateral sektor pertanian antara Indonesia dan Kerajaan Hasyimiyah Yordania.

Tiba lebih dahulu di Amman pada Ahad dini hari, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman langsung melakukan peninjauan lapangan untuk memahami kondisi pertanian dan lingkungan di wilayah tersebut. Sore harinya, Mentan Amran bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Duta Besar RI untuk Yordania menyambut langsung Presiden Prabowo di Bandara Amman.

Dalam rangka mempererat hubungan pertanian kedua negara, Mentan Amran dijadwalkan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Pertanian Kerajaan Hasyimiyah Yordania pada Senin, 14 April 2025. MoU tersebut mencakup berbagai bidang strategis, mulai dari pertukaran informasi dan program pelatihan, hingga penguatan investasi, akses pasar, dan peningkatan kapasitas SDM pertanian.

"Pertanian adalah fondasi ketahanan pangan dan diplomasi ekonomi. Kerja sama ini membuka peluang besar bagi Indonesia dan Yordania untuk tumbuh bersama di sektor pertanian," ujar Mentan Amran.

Setelah penandatanganan MoU, Mentan Amran akan mendampingi Presiden Prabowo dalam audiensi dengan Raja Abdullah II, serta pertemuan lanjutan dengan para pelaku usaha pertanian di Yordania. Langkah ini menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra strategis dalam kerja sama pertanian global dan memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam membangun sinergi lintas negara untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan regional. **Yul**

Teken MoU dengan Al Ain Farm,
Kementan Dorong Investasi Susu

Pemerintah Indonesia saat ini terus mendorong peningkatan produksi susu segar di dalam negeri. Karena itu, Kementerian Pertanian menyambut baik penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Al-Ain Farms for Livestock Production dari Persatuan Emirat Arab (PEA) terkait investasi dalam produksi susu di Indonesia.

Penandatanganan MoU ini merupakan bagian dari rangkaian kerja sama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Persatuan Emirat Arab yang ditandatangani pada tanggal 9 April 2025 di Abu Dhabi, sebagai tindak lanjut dari kunjungan Presiden RI ke PEA. Kesepakatan investasi produksi susu di Indonesia tertuang dalam Memorandum Saling Pengertian antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI, dengan Al-Ain Farms for Livestock Production PEA.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyambut positif setiap komitmen investasi dan menegaskan bahwa Kementan akan mengawal penuh prosesnya agar dapat segera direalisasikan. "Jika ingin menarik investor, maka yang utama adalah kenyamanan. Pemerintah hadir untuk mengawal agar proses investasi tidak berbelit," ujar Amran beberapa waktu lalu saat menerima kunjungan investor di Jakarta.



Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Agung Suganda menyampaikan, kerja sama dengan Al-Ain Farms ini difokuskan pada pengembangan sektor susu nasional, termasuk peningkatan produksi dan kualitas susu, serta penguatan ekosistem industri peternakan yang berkelanjutan.

"Kami menyambut baik minat investasi dari Al-Ain Farms yang akan menjadi bagian dari upaya mempercepat swasembada susu. Kerja sama ini juga diharapkan dapat membuka lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan peternak lokal melalui kemitraan," ujar Agung.

Agung menambahkan, kerja sama ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan kuantitas dan kualitas susu, namun juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

Dalam nota kesepahaman tersebut, Kementan menyatakan dukungannya terhadap rencana investasi Al Ain Farms. Salah satunya melalui program pengembangan sapi perah di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

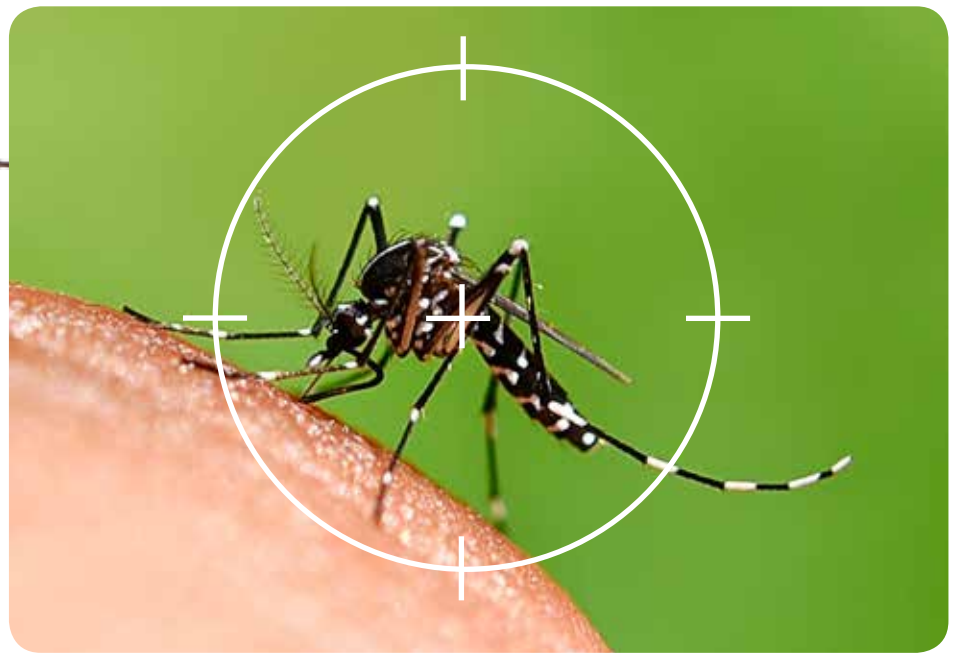
Selain itu, pemerintah juga menawarkan kemudahan akses lahan dan juga insentif diberikan, termasuk pembebasan bea masuk impor ternak dan peralatan industri, skema pembiayaan berbunga rendah, serta program asuransi peternakan.

Kementan berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh terhadap kelancaran kerja sama ini, termasuk fasilitasi regulasi dan koordinasi lintas sektor demi memastikan keberhasilan implementasi di lapangan. "Kami percaya bahwa kerja sama ini akan menjadi contoh model investasi strategis yang dapat direplikasi di wilayah lain dalam mendukung ketahanan pangan nasional," kata Agung. **Yul**

Mengatasi DBD dengan Nyamuk



Penyakit demam berdarah dengue (DBD) masih menjadi masalah kesehatan yang serius di Indonesia. Peningkatan kasus DBD umumnya akan meningkat saat musim hujan. Salah satu upaya pencegahan yang mulai diterapkan adalah teknologi nyamuk ber-wolbachia. Cara ini terbukti mampu menekan penyebaran virus dengue.



Pada akhir tahun 2022, jumlah kasus DBD di Indonesia mencapai 143 ribu. Meski pada tahun 2023 hingga awal 2024, kasus DBD berhasil diturunkan sekitar 35%, tapi pada pertengahan tahun 2024, kasus kembali mengalami kenaikan mencapai 119.709 kasus. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan total kasus DBD pada 2023 yang mencapai 114.720 kasus.

Meskipun kasus meningkat, jumlah kasus kematian akibat DBD menunjukkan penurunan. Pada 2023, jumlah kematian akibat DBD mencapai 894 kasus, sedangkan pada 2024 minggu ke-22 terdapat 777 kasus kematian. Pada tahun 2024, terdapat lima kabupaten/kota dengan jumlah kasus DBD tertinggi, yaitu Bandung, Depok, Tangerang, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur.

Menanggapi tingginya kasus DBD di Indonesia, Ahli Entomologi IPB University, Prof drh. Upik Kesumawati Hadi mengatakan, sebenarnya program pemerintah mencegah penyebaran nyamuk telah ada sejak dulu, tetapi kurang popular di masyarakat, yaitu Gerakan 3M plus. Gerakan ini adalah menguras, menutup, dan mendaur ulang sampah. Plusnya adalah upaya perlindungan diri untuk mencegah gigitan nyamuk oleh masing-masing individu.

"Gerakan 3M plus sebenarnya sangat efektif, murah, dan mudah dilakukan. Masalahnya orang enggan melakukannya," ucapnya. Selain itu menurutnya, ada juga Gerakan 1 rumah 1 jumantik (G1R1J), tetapi juga sama nasibnya dengan 3M plus. Jadi tidak heran kalau sepanjang tahun selalu terjadi kasus demam dengue dan pada musim hujan terjadi lonjakan kasus.

"Saat ini teknologi nyamuk ber-*wolbachia* telah diterapkan di lima kota, dan tidak tertutup kemungkinan akan diperluas apabila hasilnya memuaskan. Namun demikian, tetap saja upaya penerapan Gerakan 3M plus G1R1J harus dijalankan agar mencapai hasil maksimal," katanya.

Menurutnya, teknologi nyamuk ber-*wolbachia* sebenarnya telah dimanfaatkan di beberapa negara. Pemanfaatan ini dalam rangka untuk menurunkan kasus demam dengue seperti yang dilakukan Australia, Vietnam, Brazil, Kolombia, Honduras, El Salvador, dan Singapura.

"Di Indonesia, kisah sukses pemanfaatan teknologi tersebut telah dilaporkan dari Yogyakarta. Hasilnya dapat menurunkan 77 persen kasus demam dengue dan menurunkan potensi rawat inap hingga 86 persen pada tahun 2022," ucapnya seperti dikutip dari laman IPB.ac.id

Guru Besar Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis (SKHB) IPB University ini melanjutkan, teknologi nyamuk ber-*wolbachia* juga telah direkomendasikan *Vector Control Advisory Group* (VCAG) WHO pada tahun 2023 sebagai satu metode dalam menangani kasus demam dengue.

Hal ini, kata dia, menunjukkan teknologi nyamuk ber-*wolbachia* aman untuk diterapkan sebagai satu di antara metode penanganan demam dengue di Indonesia. Sebagai pilot project, saat ini pemerintah kita telah menetapkan lima kota di Indonesia, yaitu Jakarta Barat (DKI Jakarta), Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), Bontang (Kalimantan Timur), dan Kupang (NTT), untuk menerapkan teknologi penyebaran nyamuk ber-wolbachia.

"Bagaimana hasilnya tentunya kita tunggu paling tidak dalam satu sampai dua tahun ke depan," ujarnya. Lebih dalam, Prof Upik menjelaskan, *wolbachia* dalam tubuh nyamuk *Ae. aegypti* dapat memblok replikasi (perkembangbiakkan) virus dengue.

Bakteri *wolbachia* bekerja dengan cara mengambil sumber makanan untuk perkembangan virus dengue. Dengan demikian, virus tersebut kesulitan untuk berkembang biak. Akibatnya, nyamuk yang mengandung *wolbachia*, tidak mampu lagi untuk menularkan virus dengue ketika nyamuk tersebut menghisap darah orang yang terinfeksi virus dengue.

"Proses inilah yang kemudian dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai teknologi alternatif untuk mengurangi kemampuan nyamuk *Ae. aegypti* sebagai vektor penular virus dengue," ungkapnya.

Bukan Rekayasa Genetik

Menurut para ahli, lanjut Prof Upik, teknologi nyamuk ber-*wolbachia* ini bukanlah rekayasa genetik. Pasalnya, nyamuk lahir dari telur-telur yang sebelumnya sudah diintervensi bakteri *wolbachia*. Metode ini juga tidak melibatkan modifikasi genetik nyamuk *Ae. aegypti* maupun bakteri *wolbachia*.

Meskipun demikian, hasil dari penyebaran nyamuk *wolbachia* tidak dapat dirasakan langsung, namun baru akan dirasakan paling tidak 1-2 tahun setelah pelepasan nyamuk tersebut dilakukan. "Karena populasi nyamuk ber-*wolbachia* yang tersebar di daerah intervensi belum mencapai populasi yang ideal, yaitu sekitar 60 persen di alam bebas. Apabila hal ini sudah tercapai maka intervensi pelepasan nyamuk ber-wolbachia dihentikan," tuturnya.

Selanjutnya, Prof Upik mengungkapkan, secara alami nyamuk ber-*wolbachia* akan bereproduksi secara alami sampai akhirnya seluruh populasi dengan sendirinya mencapai 100 persen ber-wolbachia (proses replacement). Karena itu, teknologi pelepasan nyamuk ber-*wolbachia* tidak langsung dapat membebaskan masyarakat dari infeksi demam dengue.

"Tetap saja upaya yang utama untuk pencegahan dan pengendalian virus dengue, yaitu dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan, agar siklus hidup nyamuk *Ae. aegypti* terputus," ujarnya. Kini kembali ke masyarakat, mau atau tidak bersama-sama melakukan pencegahan dan pengendalian nyamuk *Ae. aegypti*. **Yul**